



Penerbit Yayasan  
Cendikia Mulia Mandiri



## PENDIDIKAN

# PANCASILA

Ryan Effendi, S.T., M.T  
Dra. Sudiyarti, M.Si  
Dr. Henny Saida Flora S.H., M.Hum., M.Kn  
Berty Sadipun, S.Pd., M.Pd  
Khanan Yusuf, S.AP  
Dr. Ir. N. Tri S. Saptadi, S.Kom., M.T., M.M., IPM  
Dr. Novia Wahyu Wardhani, M.Pd  
Dr. Muchamad Taufiq, S.H., M.H  
Dr. Asep Deni, M.M., CQM., CBA

# PENDIDIKAN PANCASILA

Disusun Oleh:

**Ryan Effendi, S.T., M.T**

**Dra. Sudiyarti, M.Si**

**Dr.Henny Saida Flora S.H., M.Hum., M.Kn**

**Berty Sadipun, S.Pd., M.Pd**

**Khanan Yusuf, S.AP**

**Dr. Ir. N. Tri S. Saptadi, S.Kom., M.T., M.M., IPM**

**Dr. Novia Wahyu Wardhani, M.Pd**

**Dr. Muchamad Taufiq, S.H., M.H**

**Dr. Asep Deni, M.M., CQM., CBA**



**Penerbit Yayasan  
Cendikia Mulia Mandiri**

# PENDIDIKAN PANCASILA

**Penulis:**

Ryan Effendi, S.T., M.T

Dra. Sudiyarti, M.Si

Dr.Henny Saida Flora S.H., M.Hum., M.Kn

Berty Sadipun, S.Pd., M.Pd

Khanan Yusuf, S.AP

Dr. Ir. N. Tri S. Saptadi, S.Kom., M.T., M.M., IPM

Dr. Novia Wahyu Wardhani, M.Pd

Dr. Muchamad Taufiq, S.H., M.H

Dr. Asep Deni, M.M., CQM., CBA

**Editor:**

Paput Tri Cahyono

**Penerbit:**

Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

**Redaksi:**

Perumahan Cipta No.1

Kota Batam, 29444

**Email:** cendikiamuliamandiri@gmail.com

**ISBN: 978-623-8382-76-7**

**Terbit: Januari 2024**

**IKAPI: 011/Kepri/2022**

**Exp. 31 Maret 2024**

**Ukuran:**

viii hal + 150 hal;

14,8cm x 21cm

Cetakan Pertama, 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang Keras Memperbanyak Karya Tulis Ini Dalam Bentuk Dan Dengan Cara Apapun Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit

---

## KATA PENGANTAR

Syukur *alhamdulillah* penulis haturkan kepada Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan karunia dan berkah-Nya sehingga penulis mampu merampungkan karya ini tepat pada waktunya, sehingga penulis dapat menghadirkannya dihadapan para pembaca. Kemudian, tak lupa *shalawat* dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., para sahabat, dan ahli keluarganya yang mulia.

Tulisan ini mengajak pembaca untuk menjelajahi dimensi-dimensi Pendidikan Pancasila, sebuah disiplin ilmu yang menggali hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia, Pancasila. Pendidikan Pancasila bukan sekadar materi pelajaran di ruang kelas, melainkan upaya untuk meresapi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Kita akan menyelami sejarah perkembangan Pendidikan Pancasila, memahami konsep-konsep dasar yang menjadi landasan, dan mengeksplorasi implementasi Pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia. Lebih dari itu, tulisan ini mengajak kita untuk merenung tentang relevansi

Pendidikan Pancasila di tengah dinamika zaman dan kompleksitas tantangan global.

Dalam keperluan itulah, buku **Pendidikan Pancasila** ini sengaja penulis hadirkan untuk pembaca. Tujuan buku ini adalah sebagai panduan bagi setiap orang yang ingin mempelajari dan memperdalam ilmu pengetahuan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga bagi semua pihak yang telah berpartisipasi. Terakhir seperti kata pepatah bahwa” Tiada Gading Yang Tak Retak” maka penulisan buku ini juga jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berterima kasih apabila ada saran dan masukkan yang dapat diberikan guna menyempurnakan buku ini di kemudian hari.

Desember 2023

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENGERTIAN DAN MAKNA PANCASILA.....</b>	<b>1</b>
1.1.    Pengertian Pancasila.....	1
1.2.    Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli.....	3
1.3.    Peran Pancasila dalam Pembangunan Bangsa	4
1.4.    Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sosial, Politik, dan Ekonomi.....	6
1.5.    Relevansi Pancasila di Era Modern.....	8
1.6.    Pancasila dalam Perspektif Filosofis dan Kritis .....	10
<b>BAB II PILAR-PILAR PANCASILA .....</b>	<b>13</b>
2.1.    Analisis Pilar-Pilar Pancasila.....	13
2.2.    Implementasi dan Tantangan.....	22
2.3.    Tantangan dan Relevansi Pilar-Pilar Pancasila di Era Modern.....	24
<b>BAB III KEWARGANEGARAAN DAN HAK ASASI MANUSIA.....</b>	<b>27</b>
3.1.    Pengertian Dasar Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia .....	27
3.2.    Kewarganegaraan: Identitas dan Kepemilikan Hak.....	28
3.3.    Hak Asasi Manusia: Prinsip-Prinsip dan Ruang Lingkup.....	30

3.4.	Perbandingan Sistem Kewarganegaraan di Berbagai Negara.....	32
3.5.	Tantangan Global terhadap Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan .....	34
3.6.	Implementasi HAM dan Kewarganegaraan dalam Kehidupan Sehari-hari .....	36
<b>BAB IV UUD 1945 DAN KEWARGANEGARAAN .....</b>		<b>39</b>
4.1.	Alasan-Alasan Timbunya UUD.....	46
4.2.	Fungsi Undang-Undang Dasar.....	47
4.3.	Pengertian Kewarganegaraan.....	50
4.4.	Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia .....	53
4.4.1.	Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara.....	53
4.4.2.	Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia.....	54
<b>BAB V PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN .....</b>		<b>59</b>
5.1.	Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Bangsa.....	59
5.2.	Sejarah Perkembangan Negara dan Sistem Politik.....	61
5.3.	Hukum dan Keadilan dalam Kewarganegaraan .....	64
5.4.	Pendidikan Politik dan Partisipasi Warga Negara.....	66
5.5.	Multikulturalisme dan Toleransi .....	69
5.6.	Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Kewarganegaraan .....	71

<b>BAB VI KONSEP NASIONALISME .....</b>	<b>75</b>
6.1. Pengenalan tentang Nasionalisme.....	75
6.2. Asal Usul dan Sejarah .....	76
6.3. Teori Nasionalisme: Perspektif Historis, Sosiologis, dan Politis .....	78
6.4. Nasionalisme dalam Konteks Global .....	79
6.5. Peran Nasionalisme dalam Politik dan Konflik .....	81
6.6. Pengaruh dan Dampak Nasionalisme.....	83
6.7. Kritik dan Perdebatan Terhadap Nasionalisme .....	85
 <b>BAB VII KEBANGSAAN DAN KEBERAGAMAN BUDAYA.....</b>	 <b>87</b>
7.1. Pendahuluan .....	87
7.2. Wawasan Kebangsaan.....	90
7.3. Keberagaman Budaya.....	94
7.4. Tantangan.....	98
7.5. Penutup .....	99
 <b>BAB VIII GLOBALISASI DAN TANTANGAN MEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL.....</b>	 <b>101</b>
8.1. Globalisasi .....	101
8.2. Hakikat Identitas Nasional.....	102
8.3. Tantangan Membentuk Identitas Nasional.	105
 <b>BAB IX GLOBALISASI DAN TANTANGAN TERHADAP NASIONALISME.....</b>	 <b>109</b>
9.1. Definisi Globalisasi.....	109
9.2. Sejarah dan Perkembangan Globalisasi.....	110



9.3.	Faktor-Faktor yang Mendorong Globalisasi	112
9.4.	Nasionalisme dalam Konteks Globalisasi ....	114
9.5.	Dampak Globalisasi terhadap Nasionalisme .....	117
9.6.	Kebijakan dan Strategi dalam Mempertahankan Nasionalisme .....	119
<b>BAB X KEAMANAN NASIONAL DAN SOLIDARITAS INTERNASIONAL .....</b>		<b>123</b>
10.1.	Definisi dan Ruang Lingkup Keamanan Nasional .....	123
10.2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keamanan Nasional .....	125
10.3.	Tantangan Terhadap Keamanan Nasional di Era Global .....	128
10.4.	Solidaritas Internasional .....	130
10.5.	Interkoneksi antara Keamanan Nasional dan Solidaritas Internasional .....	132
10.6.	Etika dan Tanggung Jawab Bersama dalam Keamanan Global .....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>139</b>

# **BAB I**

## **PENGERTIAN DAN MAKNA PANCASILA**

### **1.1. Pengertian Pancasila**

Pancasila adalah dasar dan falsafah negara Republik Indonesia yang terdiri dari lima asas atau prinsip dasar. Istilah "Pancasila" sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah "lima prinsip" atau "lima dasar". Pancasila digunakan sebagai panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Secara resmi, Pancasila telah menjadi dasar negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Lima asas atau prinsip dasar dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa: Mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk beragama dan berkeyakinan sesuai dengan tuntunan masing-masing agama.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghormati martabat serta hak asasi manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan membangun budaya yang beradab dan bermartabat.

3. Persatuan Indonesia: Membangun kesatuan, persatuan, dan kerukunan antarwarga Indonesia dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah: Menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, serta membangun kepemimpinan yang bijaksana.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila menjadi landasan bagi berbagai kebijakan negara, termasuk dalam pembentukan hukum, kebijakan sosial, pendidikan, dan politik. Nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi landasan bagi pembangunan Indonesia sebagai negara yang adil, merdeka, dan berdaulat.

## 1.2. Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli

Pengertian Pancasila menurut para ahli memiliki variasi tergantung pada sudut pandang dan bidang keilmuan masing-masing. Berikut adalah beberapa definisi Pancasila menurut pandangan beberapa ahli:

1. Moh. Yamin: Salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, Moh. Yamin, menggambarkan Pancasila sebagai "sebuah dasar, azas, aturan yang terdiri dari lima butir sila yang mengandung sifat-sifat yang dihormati di Indonesia."
2. Ir. Soekarno: Bapak Proklamator Republik Indonesia, Ir. Soekarno, mendefinisikan Pancasila sebagai "suatu pandangan hidup, suatu falsafah hidup bagi bangsa Indonesia, yang lahir dan tumbuh dalam sejarahnya yang kaya, yang merupakan hasil dari pengalaman hidup bangsa Indonesia."
3. Prof. Dr. Notonagoro: Ahli sejarah dan filsafat, Prof. Dr. Notonagoro, mendeskripsikan Pancasila sebagai "dasar filsafat dan ideologi dari negara Indonesia yang meliputi lima prinsip dasar yang mewakili jiwa dan semangat bangsa Indonesia."
4. Prof. Dr. Ki Bagus Hadikusumo: Seorang cendekiawan Indonesia, Prof. Dr. Ki Bagus

Hadikusumo, menggambarkan Pancasila sebagai "sebuah sistem filsafat yang terdiri dari lima prinsip pokok yang berfungsi sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia."

Setiap pengertian dari para ahli tersebut menekankan bahwa Pancasila adalah landasan atau dasar yang memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi pijakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia.

### **1.3. Peran Pancasila dalam Pembangunan Bangsa**

Peran Pancasila dalam pembangunan bangsa Indonesia sangatlah signifikan, menjadi landasan filosofis dan ideologis dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut adalah beberapa peran utama Pancasila dalam pembangunan bangsa:

1. **Dasar Ideologi Negara:** Pancasila menjadi dasar filosofis dan ideologis yang mengikat keseluruhan kehidupan negara Indonesia, menjadi pegangan dalam merumuskan kebijakan dan hukum yang adil bagi seluruh rakyat.

2. Penguatan Identitas Nasional: Menjadi pilar yang mengokohkan identitas bangsa Indonesia, menggabungkan keberagaman etnis, budaya, dan agama menjadi satu kesatuan yang kokoh.
3. Pedoman Pembangunan Sosial: Mengarahkan pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, atau golongan tertentu.
4. Dasar dalam Pembentukan Kebijakan: Menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, hukum, dan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
5. Penguatan Kehidupan Berdemokrasi: Menegaskan prinsip demokrasi yang dipimpin oleh hikmah, mempromosikan musyawarah dalam pengambilan keputusan serta membangun pemimpin yang bijaksana.
6. Pendidikan dan Pemasarakatan Nilai-nilai: Menjadi dasar pendidikan untuk menyebarkan dan memperkuat nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, serta diperjuangkan untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pancasila tidak hanya menjadi semacam lambang, tetapi juga merupakan pondasi bagi pembangunan bangsa yang kokoh. Melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pancasila menjadi panduan untuk mewujudkan visi Indonesia yang adil, merdeka, dan berdaulat.

#### **1.4. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Sosial, Politik, dan Ekonomi**

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia merupakan bagian integral dari visi pembangunan nasional. Berikut beberapa aspek implementasi nilai-nilai Pancasila dalam tiga bidang tersebut:

##### **1. Pembangunan Sosial:**

- Pendidikan Berbasis Nilai-nilai Pancasila: Memasukkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan sebagai landasan moral dan etika bagi generasi muda Indonesia.
- Peningkatan Kesadaran Kebangsaan: Mendorong pembentukan identitas nasional yang kuat dengan mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi kesatuan dan persatuan.

- Pemberdayaan Masyarakat: Mengadopsi prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pembangunan sosial untuk memastikan kesetaraan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Pembangunan Politik:
- Demokrasi Berbasis Musyawarah: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik melalui mekanisme musyawarah dan mufakat sesuai prinsip Pancasila.
  - Kepemimpinan yang Bijaksana: Mendorong terbentuknya pemimpin yang bertanggung jawab, bijaksana, dan berkepemimpinan moral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Pembangunan Ekonomi:
- Pembangunan yang Adil dan Merata: Memastikan distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat, mengurangi ketimpangan sosial ekonomi.
  - Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat dengan prinsip keadilan sosial untuk



meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang pembangunan menekankan pada prinsip kesetaraan, keadilan, persatuan, dan kemanusiaan. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkeadilan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

### **1.5. Relevansi Pancasila di Era Modern**

Pancasila tetap relevan di era modern karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki aplikabilitas yang luas dalam konteks zaman yang terus berubah. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Pancasila masih relevan di era modern:

1. Keselarasan dengan Prinsip Global: Nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, toleransi, dan keadilan sosial merupakan prinsip-prinsip universal yang tetap relevan dalam tatanan global yang semakin terkoneksi.
2. Mengatasi Tantangan Kontemporer: Nilai-nilai Pancasila memiliki kapasitas untuk menangani tantangan kontemporer seperti radikalisme,

ekstremisme, konflik agama, dan ketimpangan sosial.

3. Dasar Demokrasi dan Keadilan Sosial: Pancasila mewakili dasar demokrasi yang inklusif dan keadilan sosial, yang sangat penting dalam konteks masyarakat yang beragam dan terus berubah.
4. Identitas Bangsa yang Beragam: Indonesia sebagai negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agama memerlukan landasan yang kuat untuk menyatukan dan menghargai keberagaman tersebut.
5. Panduan Pembangunan Nasional: Nilai-nilai Pancasila memberikan panduan bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan, berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial.
6. Menjaga Kedaulatan dan Kedamaian: Dalam situasi geopolitik global yang kompleks, Pancasila memainkan peran penting dalam menjaga kedaulatan dan perdamaian bangsa Indonesia.

Relevansi Pancasila di era modern bukan hanya sebagai doktrin sejarah, tetapi sebagai pedoman aktual

yang memandu kebijakan dan tindakan dalam memenuhi tantangan zaman saat ini. Dengan menyesuaikan nilai-nilai dalam Pancasila dengan perubahan zaman, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang berlandaskan keadilan, kesatuan, dan keberagaman yang harmonis.

### **1.6. Pancasila dalam Perspektif Filosofis dan Kritis**

Pancasila dalam perspektif filosofis dan kritis membawa sejumlah interpretasi dan analisis yang mendalam terkait dengan sifat-sifatnya sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Beberapa sudut pandang filosofis dan kritis tentang Pancasila meliputi:

1. Analisis Filosofis Nilai-nilai Pancasila: Penelitian mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dari sudut pandang filosofis, seperti aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.
2. Kritik terhadap Implementasi Nilai-nilai Pancasila: Kajian yang mengidentifikasi gap antara prinsip-prinsip Pancasila dalam teori dengan prakteknya dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat.
3. Analisis Filosofis tentang Keseimbangan Nilai: Penelitian yang menggali hubungan antara

kelima sila Pancasila dan bagaimana interaksi di antara nilai-nilai tersebut dapat menciptakan harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan sosial.

4. Eksplorasi Konsep Pancasila dalam Karya Filosofis: Pengkajian tentang bagaimana konsep-konsep dalam Pancasila tercermin dalam karya-karya filsafat atau ideologis dari para pemikir dan intelektual.
5. Analisis Terhadap Relevansi Pancasila dalam Masyarakat Multikultural: Kajian yang meneliti relevansi dan aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat yang multikultural, menggabungkan berbagai nilai dan kepercayaan.
6. Kritik terhadap Konsistensi dan Implikasi Etis: Evaluasi terhadap konsistensi nilai-nilai Pancasila dan bagaimana implikasinya dalam memberikan arah etis bagi tindakan individu dan pemerintah.

Perspektif filosofis dan kritis tentang Pancasila mencakup berbagai aspek interpretatif, evaluatif, dan analitis untuk memahami, mengevaluasi, serta merumuskan implikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Hal ini membuka ruang bagi pemikiran kritis

terhadap implementasi dan relevansi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik Indonesia.

## **BAB II**

### **PILAR-PILAR PANCASILA**

#### **2.1. Analisis Pilar-Pilar Pancasila**

Analisis lengkap tentang pilar-pilar Pancasila melibatkan pemahaman mendalam terkait setiap prinsip yang menjadi fondasi dasar bagi negara Indonesia. Mari kita analisis secara singkat masing-masing pilar Pancasila:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa:

a. Makna:

- Mengakui adanya Tuhan atau kekuatan yang Maha Esa yang menjadi landasan bagi nilai-nilai moral, etika, dan spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat.
- Mendorong warga Indonesia untuk mengakui, menghormati, dan menjalankan kepercayaan agama atau spiritualitas mereka sendiri tanpa adanya paksaan atau diskriminasi.

b. Implikasi:

- Kebebasan Beragama: Memberikan kebebasan beragama bagi setiap individu atau kelompok untuk menjalankan keyakinan agama atau kepercayaan spiritual mereka dengan damai.
  - Toleransi Antar-Agama: Mendorong sikap saling menghormati dan toleransi antarumat beragama, serta menghindari konflik atau diskriminasi berbasis agama.
  - Kerukunan dan Keharmonisan: Menciptakan kerukunan serta keharmonisan di antara warga yang memiliki kepercayaan agama yang berbeda-beda.
- c. Nilai-nilai Sosial dan Budaya:
- Mengakui peran agama dalam membentuk nilai-nilai sosial, etika, dan moral yang turut memengaruhi budaya Indonesia.
  - Menegaskan pentingnya nilai-nilai moral agama dalam memberikan panduan bagi perilaku individu dan masyarakat secara umum.

Pilar ini menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap kebebasan beragama dan nilai-nilai spiritualitas dalam masyarakat yang beragam secara agama. Implikasinya adalah menciptakan landasan yang kuat bagi toleransi, harmoni, dan penghormatan terhadap perbedaan agama di Indonesia.

## 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:

### a. Makna:

- Keadilan: Mempertimbangkan martabat dan hak asasi manusia tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.
- Kesopanan dan Kebijaksanaan: Menciptakan budaya interaksi yang santun, bijaksana, dan penuh rasa hormat dalam berhubungan dengan sesama.

### b. Implikasi:

- Hak Asasi Manusia: Mendorong perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, dan ketidakadilan sosial.



- Kesejahteraan Sosial: Mempromosikan kesetaraan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi semua individu.
  - Pendidikan dan Etika: Memajukan pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai moral, etika, dan kesopanan dalam interaksi sosial.
- c. Pembangunan Berkelanjutan:
- Menciptakan dasar bagi pembangunan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan keadilan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Pilar ini menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap semua individu serta menciptakan budaya kesopanan dan kebijaksanaan dalam interaksi sosial. Implikasinya adalah mendorong kesetaraan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan pemberdayaan masyarakat agar terwujud kemanusiaan yang adil dan beradab dalam masyarakat.

### 3. Persatuan Indonesia:

#### a. Makna:

- Kesatuan: Menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, serta menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama sebagai kekayaan bangsa.
- Persatuan: Membangun semangat persatuan nasional yang kuat di antara seluruh warga Indonesia, meleburkan perbedaan menjadi kekuatan.

#### b. Implikasi:

- Semangat Kebangsaan: Mendorong rasa bangga menjadi bagian dari Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan bersatu.
- Toleransi dan Keharmonisan: Membangun kerukunan serta toleransi di antara beragam kelompok sosial, etnis, dan agama.
- Patriotisme dan Identitas Nasional: Memupuk semangat patriotisme dan identitas nasional yang kuat di antara warga Indonesia.

#### c. Solidaritas dan Kepedulian:

- Menggalang solidaritas serta saling peduli di antara masyarakat Indonesia dalam membangun negara yang kokoh.

Pilar ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman, menggarisbawahi bahwa perbedaan adalah kekayaan yang harus disatukan untuk membangun bangsa yang kokoh. Implikasinya adalah terciptanya semangat persatuan, toleransi, dan solidaritas di antara seluruh komponen bangsa.

#### 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah:

##### a. Makna:

- Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
- Kebijaksanaan: Menegaskan perlunya kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang dalam proses pembuatan kebijakan.

##### b. Implikasi:

- Demokrasi yang Inklusif: Membangun sistem yang memungkinkan partisipasi

seluruh lapisan masyarakat dalam proses politik dan pembuatan keputusan.

- **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam tindakan pemerintah, serta memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengevaluasi kebijakan yang diambil.
  - **Pendidikan Politik:** Mendorong pendidikan politik dan kesadaran partisipasi bagi seluruh warga negara.
- c. **Pengelolaan Kebijakan yang Bijaksana:**
- Menekankan pentingnya pengelolaan pemerintahan yang bijaksana dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pilar ini menegaskan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta perlunya pertimbangan yang bijaksana dalam setiap langkah kebijakan. Implikasinya adalah terciptanya demokrasi yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

## 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

### a. Makna:

- Keadilan Sosial: Menjamin hak setiap individu dalam mendapatkan manfaat dari pembangunan serta pemerataan hasil pembangunan.
- Kesejahteraan Sosial: Mendorong pemerataan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat.

### b. Implikasi:

- Pemerataan Ekonomi: Mendorong pembangunan yang merata di seluruh wilayah, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar-daerah dan antar-lapisan masyarakat.
- Perlindungan Sosial: Menjamin perlindungan sosial bagi mereka yang rentan dan membutuhkan, termasuk kelompok miskin, anak-anak, dan lanjut usia.
- Akses Layanan Publik: Mempastikan akses yang setara terhadap layanan

publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi semua warga.

c. Kepastian Hukum dan Keadilan:

- Mendorong sistem hukum yang adil dan berkeadilan untuk semua, tanpa pandang bulu atau kepentingan tertentu.

Pilar ini menekankan perlunya kesetaraan dan keadilan sosial dalam pembangunan negara, yang memastikan bahwa semua warga negara mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan. Implikasinya adalah terciptanya masyarakat yang lebih merata, adil, dan berkeadilan bagi seluruh warga Indonesia.

Analisis yang komprehensif tentang pilar-pilar Pancasila melibatkan evaluasi terhadap implementasi, tantangan yang dihadapi, serta relevansi dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Hal ini juga melibatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ini berkontribusi dalam membentuk fondasi negara dan masyarakat yang adil, beradab, serta bersatu.

## 2.2. Implementasi dan Tantangan

Implementasi nilai-nilai dalam Pancasila dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan prinsip-prinsip ini memiliki dampak besar pada perkembangan sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Berikut adalah implementasi dan tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila:

Implementasi:

1. Pendidikan Nilai-nilai Pancasila: Memasukkan pendidikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum sekolah untuk membentuk karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila.
2. Kebijakan Publik yang Berlandaskan Pancasila: Menerapkan kebijakan yang bersifat inklusif, adil, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
3. Penguatan Institusi dan Sistem Hukum: Memastikan bahwa institusi dan sistem hukum memegang prinsip-prinsip Pancasila dalam menjalankan fungsinya.

Tantangan:

1. Ketidaksesuaian Nilai dengan Praktek: Tantangan terbesar adalah kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila dengan praktek di lapangan.

Misalnya, ketidakadilan sosial, diskriminasi, atau korupsi.

2. Tantangan Multikulturalisme: Mengelola keberagaman agama, budaya, dan suku di Indonesia tanpa terjadi konflik atau ketegangan antar-kelompok.
3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Tantangan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai Pancasila serta mendorong mereka untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Komitmen Pemerintah: Pentingnya komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang berlandaskan Pancasila dengan integritas dan transparansi.

Implementasi nilai-nilai Pancasila memerlukan kerja keras, komitmen, dan partisipasi dari semua lapisan masyarakat serta lembaga-lembaga terkait. Tantangan-tantangan yang dihadapi menuntut solusi yang holistik, melibatkan berbagai aspek seperti pendidikan, penguatan lembaga, dan peran aktif masyarakat dalam memahami dan menjalankan nilai-nilai Pancasila.



### **2.3. Tantangan dan Relevansi Pilar-Pilar Pancasila di Era Modern**

Di era modern, pilar-pilar Pancasila masih relevan namun juga dihadapkan pada tantangan baru yang berkaitan dengan dinamika perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Berikut adalah beberapa tantangan dan relevansi pilar-pilar Pancasila di era modern:

#### **1. Ketahanan Nilai Tradisional:**

- **Tantangan:** Di tengah pengaruh globalisasi, tantangan utama adalah menjaga nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam pilar-pilar Pancasila agar tetap relevan dan tidak tergerus oleh nilai-nilai asing.
- **Relevansi:** Pilar-pilar Pancasila, seperti persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, masih relevan sebagai fondasi untuk membangun identitas nasional yang kuat dan inklusif di era globalisasi.

#### **2. Teknologi dan Komunikasi:**

- **Tantangan:** Berkembangnya teknologi mempengaruhi cara komunikasi dan interaksi antarindividu serta membawa tantangan baru terkait penyebaran informasi yang bisa mendukung atau mengancam nilai-nilai Pancasila.

- Relevansi: Pilar-pilar Pancasila, seperti toleransi dan persatuan, penting dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi dan memastikan informasi yang disebarkan mendukung kerukunan sosial.
3. Multikulturalisme dan Pluralisme:
- Tantangan: Keanekaragaman sosial, agama, dan budaya memerlukan pendekatan yang inklusif dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari kekuatan bersama, namun juga memerlukan upaya untuk mengelola potensi konflik.
  - Relevansi: Pilar-pilar Pancasila, seperti persatuan, keadilan, dan toleransi, tetap relevan dalam mengelola multikulturalisme dan membangun kohesi sosial di tengah keragaman.
4. Keadilan Sosial dan Kesejahteraan:
- Tantangan: Ketimpangan ekonomi dan sosial, bersama dengan tantangan global seperti perubahan iklim, memerlukan perhatian khusus untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

- Relevansi: Pilar keadilan sosial dalam Pancasila tetap relevan sebagai panduan untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Pilar-pilar Pancasila tetap relevan di era modern sebagai landasan bagi pembangunan sosial, politik, dan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, tantangan baru di era modern memerlukan adaptasi dan inovasi dalam penerapan nilai-nilai tersebut agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika zaman.

# **BAB III**

## **KEWARGANEGARAAN DAN HAK ASASI MANUSIA**

### **3.1. Pengertian Dasar Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia**

Kewarganegaraan: Kewarganegaraan merujuk pada status hukum seseorang yang menandakan keterkaitannya dengan sebuah negara tertentu. Status ini memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada individu yang diatur oleh hukum negara tersebut. Seorang warga negara biasanya memiliki hak untuk tinggal, bekerja, dan memiliki akses terhadap layanan sosial dan politik di negaranya. Kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran di suatu negara (*ius soli*) atau melalui keturunan (*ius sanguinis*), serta melalui proses naturalisasi.

Hak Asasi Manusia (HAM): Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada semua individu secara universal, tidak tergantung pada ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas

keadilan, dan hak untuk tidak disiksa atau dianiaya. Hak asasi manusia diakui dalam banyak perjanjian internasional dan konstitusi negara sebagai standar dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

Kewarganegaraan dan hak asasi manusia memiliki keterkaitan yang erat, karena status kewarganegaraan menentukan sebagian besar hak dan kewajiban seseorang di dalam suatu negara, sementara hak asasi manusia melindungi hak-hak fundamental individu dari campur tangan negara atau pihak lain. Perlindungan hak asasi manusia adalah tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi untuk semua individu yang berada di wilayahnya.

### **3.2. Kewarganegaraan: Identitas dan Kepemilikan Hak**

Kewarganegaraan bukan hanya tentang hukum formal atau status dokumen, tetapi juga mengenai identitas individu dan kepemilikan hak yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan suatu negara. Di sini, saya jabarkan lebih lanjut:

Identitas Kewarganegaraan: Identitas kewarganegaraan merujuk pada kesadaran individu

terhadap afiliasi mereka dengan suatu negara. Hal ini mencakup rasa kebanggaan, loyalitas, dan pengakuan terhadap nilai-nilai, budaya, serta sejarah negara tersebut. Identitas kewarganegaraan dapat memengaruhi persepsi diri seseorang dan bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat dan pemerintah.

**Kepemilikan Hak:** Kepemilikan hak adalah konsep bahwa sebagai warga negara, seseorang memiliki hak-hak tertentu yang dilindungi dan diatur oleh hukum negara tersebut. Ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan sosial lainnya.

Identitas kewarganegaraan dan kepemilikan hak merupakan dua aspek penting dari kewarganegaraan yang saling terkait. Identitas kewarganegaraan membentuk persepsi individu terhadap diri mereka sendiri sebagai bagian dari suatu komunitas nasional, sementara kepemilikan hak menjamin bahwa individu tersebut memiliki akses terhadap hak-hak yang diberikan oleh negara tempat mereka menjadi warga.

Kedua aspek ini membentuk kesatuan yang kokoh dalam memahami bagaimana kewarganegaraan bukan hanya sekadar status hukum, tetapi juga identitas sosial, politik, dan budaya yang membentuk hubungan individu dengan negara tempat mereka tinggal.

### **3.3. Hak Asasi Manusia: Prinsip-Prinsip dan Ruang Lingkup**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap individu secara universal, tidak tergantung pada ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan. Prinsip-prinsip dasar HAM meliputi:

1. **Universalitas:** Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa diskriminasi. Setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi.
2. **Kedudukan yang Tidak Dapat Dicabut:** HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah atau otoritas lainnya.
3. **Keterkaitan dan Interdependensi:** Hak-hak asasi manusia saling terkait dan saling mendukung. Keberadaan satu hak tidak boleh mengorbankan hak-hak yang lain.

4. Keseimbangan dengan Kewajiban: HAM diikuti oleh kewajiban etis, baik terhadap individu itu sendiri maupun terhadap masyarakat di sekitarnya. Hak-hak individu harus diimbangi dengan tanggung jawab terhadap hak-hak orang lain dan komunitas.

Ruang lingkup hak asasi manusia meliputi beragam aspek kehidupan, seperti:

- Hak sipil dan politik: Misalnya, hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berorganisasi, hak untuk memilih, serta hak untuk mendapat perlindungan hukum yang adil.
- Hak ekonomi, sosial, dan budaya: Meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, perumahan layak, pekerjaan yang layak, serta kebebasan dari kelaparan dan kemiskinan.
- Hak-hak kemanusiaan: Ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa atau disiksa, hak untuk tidak mengalami perlakuan tidak manusiawi, dan hak untuk kebebasan dari perbudakan.



Ruang lingkup ini terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan politik. Prinsip-prinsip HAM bersifat dinamis dan selalu berusaha untuk mencakup hak-hak yang relevan dengan konteks zaman dan kebutuhan manusia secara global

### **3.4. Perbandingan Sistem Kewarganegaraan di Berbagai Negara**

Sistem kewarganegaraan dapat bervariasi di seluruh dunia, dan perbandingannya mencakup beberapa model utama:

1. Ius Soli vs. Ius Sanguinis:
  - Ius Soli: Prinsip kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran. Contohnya adalah Amerika Serikat, di mana seseorang menjadi warga negara AS jika lahir di wilayah AS, terlepas dari kewarganegaraan orang tua.
  - Ius Sanguinis: Prinsip kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Misalnya, di Jerman, anak-anak dapat mewarisi kewarganegaraan dari orang tua mereka, bahkan jika mereka lahir di luar Jerman.
2. Kewarganegaraan Berganda:

- Beberapa negara mengizinkan kewarganegaraan berganda, yang memungkinkan seseorang memegang kewarganegaraan dari lebih dari satu negara secara bersamaan. Misalnya, Amerika Serikat memperbolehkan kewarganegaraan berganda, tetapi beberapa negara melarangnya.
3. Kewarganegaraan Terbuka dan Terbatas:
- Beberapa negara memiliki kebijakan kewarganegaraan yang terbuka bagi imigran, sementara negara lain memiliki proses yang lebih ketat dan terbatas untuk memperoleh kewarganegaraan. Misalnya, Kanada memiliki program imigrasi yang dapat menyebabkan kewarganegaraan bagi imigran yang memenuhi syarat tertentu.
4. Kewarganegaraan Otomatis vs. Naturalisasi:
- Kewarganegaraan otomatis diberikan secara langsung, seperti melalui kelahiran di suatu negara atau karena hukum tertentu. Sementara naturalisasi melibatkan proses untuk memperoleh kewarganegaraan setelah memenuhi syarat tertentu, seperti

masa tinggal, ujian bahasa, atau ujian mengenai pengetahuan negara.

Setiap negara memiliki aturan dan kebijakan kewarganegaraan yang berbeda, yang sering kali tercermin dari sejarah, nilai-nilai budaya, serta kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh negara tersebut. Perbedaan ini dapat memengaruhi siapa yang memenuhi syarat menjadi warga negara, bagaimana proses naturalisasi dilakukan, dan apakah kewarganegaraan berganda diizinkan atau tidak.

### **3.5. Tantangan Global terhadap Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan**

Tantangan global terhadap hak asasi manusia (HAM) dan kewarganegaraan mencakup beragam isu yang memengaruhi individu secara luas di berbagai negara. Beberapa tantangan yang signifikan termasuk:

1. Krisis Pengungsi dan Migrasi: Pengungsi dan migran seringkali menghadapi pelanggaran HAM, seperti ketidakstabilan status kewarganegaraan, diskriminasi, penahanan ilegal, dan akses terbatas terhadap layanan dasar.

2. Diskriminasi dan Ketimpangan: Diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau kebangsaan merupakan tantangan serius dalam memberikan perlindungan HAM yang merata kepada semua individu.
3. Perubahan Iklim dan Konflik: Perubahan iklim menyebabkan konflik atas sumber daya yang terbatas, mengancam hak-hak asasi individu yang terkait dengan keamanan pangan, akses air bersih, dan pemukiman yang layak. Konflik yang berkaitan juga seringkali melanggar HAM.
4. Peretasan dan Keamanan Siber: Penggunaan teknologi dan internet yang berkembang pesat dapat menghadirkan ancaman terhadap privasi dan keamanan individu, serta meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran hak asasi.
5. Eksploitasi dan Perdagangan Manusia: Eksploitasi seksual, perdagangan manusia, dan buruh paksa masih menjadi masalah serius yang melanggar hak asasi manusia di seluruh dunia.
6. Krisis Kemanusiaan dan Konflik Bersenjata: Konflik bersenjata yang berkepanjangan seringkali menyebabkan krisis kemanusiaan, dengan jutaan orang kehilangan tempat tinggal,

kehilangan hak-hak dasar, dan hidup dalam kondisi yang tidak aman.

7. Otoritarianisme dan Pelanggaran HAM oleh Pemerintah: Di beberapa negara, otoritarianisme dan kebijakan yang represif dapat menyebabkan pembatasan kebebasan berbicara, penahanan sewenang-wenang, dan penindasan terhadap aktivis HAM.

Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif di tingkat global dan nasional. Hal ini mencakup penerapan kebijakan yang melindungi HAM, upaya diplomasi, penguatan hukum internasional, perlindungan terhadap pengungsi dan migran, serta pendekatan proaktif terhadap isu-isu lingkungan, keamanan siber, dan ketimpangan sosial.

### **3.6. Implementasi HAM dan Kewarganegaraan dalam Kehidupan Sehari-hari**

Implementasi hak asasi manusia (HAM) dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari melibatkan beragam aspek yang memengaruhi individu secara langsung. Beberapa contoh implementasi ini dapat dilihat dalam:

1. Pendidikan dan Kesehatan: Akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan merupakan bagian dari implementasi HAM. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
2. Kebebasan Berbicara dan Ekspresi: Memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, berbicara, dan berekspresi tanpa takut akan tekanan atau represi adalah bagian dari implementasi HAM dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk di lingkungan sosial, tempat kerja, dan dalam ranah publik.
3. Hak untuk Memilih dan Berpartisipasi dalam Proses Politik: Hak untuk memilih dan berpartisipasi dalam proses politik adalah hak kewarganegaraan yang penting. Ini termasuk hak untuk terlibat dalam pemilihan umum, memberikan suara, dan terlibat dalam kegiatan politik di komunitas.
4. Perlindungan dari Diskriminasi: Implementasi HAM juga melibatkan perlindungan terhadap individu dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, orientasi seksual, atau kebangsaan. Masyarakat yang inklusif dan bebas

dari diskriminasi merupakan bagian dari implementasi HAM.

5. Perlindungan Privasi dan Keamanan:
6. Hak atas privasi dan keamanan individu dalam kehidupan digital dan nyata adalah bagian penting dari implementasi HAM. Ini termasuk perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dan kebebasan dari ancaman keamanan siber.
7. Keterlibatan Aktif dalam Kehidupan Sosial: Keterlibatan dalam kegiatan sosial, budaya, dan politik di lingkungan lokal juga merupakan bagian dari implementasi kewarganegaraan. Hal ini mencakup kontribusi aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Implementasi HAM dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari melibatkan pembangunan masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab. Ini mencakup memberikan hak yang sama kepada semua individu, melindungi mereka dari diskriminasi, dan memastikan bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam proses kehidupan sosial, politik, dan ekonomi tanpa takut akan pelanggaran hak-hak dasar mereka.

## **BAB IV**

### **UUD 1945 DAN KEWARGANEGARAAN**

UUD 1945 secara sistematis pada sebelum perubahan UU/amandemen UUD 1945 terdiri atas tiga unsur yaitu Pembukaan, Batang Tubuh dan Penjelasan. Pembukaan berisi empat pokok pikiran yang secara yudisial merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yang direalisasikan lebih lanjut pada pasal-pasal UUD 1945 serta paragraf-paragraf yang berisi segala hal tentang asas dasar proklamasi dan pokok-pokok ketatanegaraan dari negara yang dibentuk sedangkan batang tubuh berisi pasal-pasal dari UUD yang terdiri atas 37 Pasal termasuk pasal tentang perubahan dan penjelasan memberikan pengertian secara rinci makna yang tercantum pada pasal-pasal UUD 1945. Namun setelah masa reformasi dan terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, sistematis UUD 1945 hanya terdiri dari dua unsur, yaitu pembukaan dan pasal-pasal saja.

Meskipun seolah-olah pembukaan UUD 1945, merupakan bagian dari UUD 1945, sebenarnya keduanya lahir secara terpisah, masing-masing hanya bersamaan hari dan tanggal pengesahannya seperti yang



dikemukakan oleh Notonagoro dalam bukunya mengenai Pembukaan UUD 1945 (Pokok kaedah negara yang fundamental) bahwa UUD 1945 bukanlah merupakan hukum yang tertinggi sedangkan pembukaan pada hakikatnya terpisah dengan UUD 1945 dan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental, sedangkan intinya adalah pancasila. (Panji Setijo,2006:66).

Pembukaan UUD 1945 pada prinsipnya sangat erat kaitannya dengan proklamasi maupun dengan pancasila. Dalam Pembukaan tercantum permasalahan yang sangat berhubungan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan RI,yaitu suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila, juga ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 juga memuat asas-asas dan dasar proklamasi kemerdekaan yang hakikatnya menyatu dan tidak terpisahkan. Selain itu juga mengandung penjelasan yang rinci tentang cita-cita luhur proklamasi (declaration of independence) dari bangsa indonesia dan menjadi satu rangkaian dalam proklamasi 17 Agustus 1945. Cita-cita bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat dan negara yang meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang setiap warga negara hidup atas dasar saling menghargai dan

salsing menghormati serta menjadi landasan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dan pada akhirnya proklamasi kemerdekaan RI merupakan pencetusan atas semangat pancasila sebagai titik kulminasi tekad bangsa Indonesia untuk merdeka.

Pembukaan UUD 1945, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental memiliki arti antara lain sebagai berikut :

- a. Sumber hukum dari UUD 1945 karena pembukaan UUD 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk
- b. Menurut teori hukum, yang meletakkan dasar negara adalah PPKI yang menjadi pembentuk negara yang pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945
- c. Pembentuk negara (PPKI) mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pemerintah atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan pemerintah dan MPR hanya merupakan alat perlengkapan negara yang kedudukannya lebih rendah dari pembentuk negara.
- d. Secara hukum semua produk hukum hanya bisa diubah/dihapus oleh ketentuan yang lebih tinggi

kedudukannya sehingga Pembukaan UUD 1945 hanya dapat diubah oleh pembentuk negara (PPKI) yang pada saat ini sudah tidak ada lagi.

UUD merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Pembukaan juga merupakan sumber dari cita hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan hak dalam lingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat dalam alinea itu setiap alinea dan kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Lestari karena mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD 1945 bersama-sama dengan UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

dan diundangkan termuat dalam Negara Republik Indonesia, Tahun II, Nomor 7 Tanggal 15 Februari 1946.

Menurut Notonagoro (1974) Pembukaan UUD 1945 menurut isinya dapat dibagi atas 4 bagian yaitu : (Surajiwo, 2019:154)

- Bagian I: Pernyataan hak segala bangsa akan kemerdekaan
- Bagian II: Mengandung pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
- Bagian III: Pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia
- Bagian IV: Mengikrarkan pernyataan pembentukan pemerintah negara dengan dasar kerohanian negara yang lazimnya disebut Pancasila dari

Diantara keempat bagian tersebut dapat diadaka "garis pemisah", mengenai adanya rangkaian peristiwa dan keadaan, berkenaan dengan berdirinya negara Indonesia melalui pernyataan Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yaitu :

- a. Rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya Negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran

kebangsaan Indonesia dalam wujud terbentuknya Negara Indonesia (Alinea I, II, III Pembukaan ).

- b. Yang merupakan ekspresi peristiwa dan keadaan setelah Negara Indonesia terwujud (Alinea IV Pembukaan).

Garis pemisah antara kedua macam peristiwa dan keadaan tersebut dengan jelas ditandai oleh pengertian yang terkandung dalam isitilah "Kemudian dari pada itu" pada alinea IV pembukaan sehingga dapatlah ditentukan sifat hubungan antara masing-masing bagian pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari empat alinea, dan setiap alinea memiliki spesifikasi jika ditinjau berdasarkan isinya. Alinea I, II , III memuat segolongan pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal nya. Bagian tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Bagian alinea IV memuat dasar-dasar fundamental negara. Oleh karena itu alinea IV memiliki hubungan "kausal organis" dengan pasal-pasal UUD 1945 yang mencakup beberapa segi:

- a. UUD ditentukan akan ada

- b. Yang diatur dalam UUD ialah tentang pembentukan pemerintah negara yang memenuhi pelbagai persyaratan.
- c. Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan rakyat
- d. Ditetapkannya dasar kerokhanian (Filsafat Negara Pancasila).

Pada alinea I, II III dikatakan tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan UUD 1945 sebab:

- a. Alinea I, II, III itu pernyataan keadaan sebelum terbentuknya negara
- b. Alinea I, II, III, memuat segolongan pernyataan yang materinya tidak ada yang memungkinkan untuk bisa terbentuknya UUD.

Pada alinea dikatakan mempunyai hubungan kausal organis dengan UUD sebab :

- a. Alinea IV pernyataan mengenai keadaan setelah Negara Indonesia ada
- b. Alinea IV memuat pokok-pokok pikiran dimana pokok-pokok pikiran itu harus diwujudkan di dalam UUD melalui pasal-pasal nya.
- c. Aliena IV , merupakan "sebab adanya " dari adanya UUD, hal ini diwujudkan di dalam suatu

bentuk kemerdekaan kebangsaan dalam kalimat "...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Inodnesia...." kalimat tersebut merupakan/mengandung perintah untuk segera dibentuk adanya UUD sebagai hkum dasar.

#### **4.1. Alasan-Alasan Timbunya UUD**

- a. Karena keinginan warga negaranya untuk menjamin hak-hak mereka dan membatasi tindakan-tindakan pamerintah agar tidak lagi melanggar hakh-hak warga negaranya
- b. Untuk menciptakan suatu bentuk sistem ketatanegaraan yang semual tidak tertentu ke dalam bentuk yang tertentu
- c. Karena keinginan pembentuk negara yang baru untuk menjamin adanya cara penyelenggaraan ketatanegaraan dalam bentuk yang permanen dan dapat diterima oleh rakyatnya.
- d. Keinginan untuk menjamin adanya kerjasama yang efektif dan negara-negara yang tergabung dalam dalam suatu Federasi.

## 4.2. Fungsi Undang-Undang Dasar

Secara teoretis, Undang-undang dasar harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat mengenai bentuknya dan syarat mengenai isinya. Bentuknya sebagai naskah tertulis yang merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Isinya merupakan peraturan yang bersifat fundamental, artinya bahwa tidak semua masalah yang penting harus dimuat dalam Undang-undang Dasar, melainkan hal-hal yang pokok, dasar atau asas saja. Penampilan hukum itu sendiri berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman sehingga isi dari Undang-Undang dasar itu hanya meliputi hal-hal yang bersifat dasar saja.

Oleh karena itu Undang-Undang Dasar Mempunyai dua fungsi yaitu untuk menjamin hak-hak asasi dan sebagai landasan penyelenggaraan negara :

- a. Untuk menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta kepentingan rakyat, dari tindakan sewenang-wenang, penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan-tindakan menguntungkan diri sendiri dari para penguasa negara
- b. Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan yang



tertentu dan dapat diterima dan dimengerti oleh rakyatnya. Dengan kata lain dapat pula disebut landasan struktural dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sifat UUD adalah merupakan aturan-aturan pokok, singkat dan supel, atau menekankan perlunya semangat. UUD 1945 merupakan aturan-aturan pokok yang merupakan garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara, menyelenggarakan kehidupan negara dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan aturan pokok itu dengan hukum dalam tingkat yang lebih rendah yakni undang-undang karena lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya dan mencabutnya.

UUD 1945 bersifat singkat dan supel yang berarti UUD 1945 selalu dapat mengikuti dinamika kehidupan masyarakat dan tidak ketinggalan zaman. UUD 1945 menekankan perlunya semangat kepada para pemimpin pemerintahan dan para penyelenggara negara. Dikatakan singkat artinya bahwa UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja, memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara dalam menyelenggarakan

tugasnya. Dikatakan singkat karena UUD 1945 hanya terdiri dari 37 Pasal saja. Jika dibandingkan dengan konstitusi-konstitusi Indonesia lainnya adalah benar-benar merupakan suatu konstitusi yang singkat yakni Konstitusi RIS 1949 terdiri dari 197 Pasal dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdiri dari 146 Pasal, apalagi jika dibandingkan dengan konstitusi-konstitusi negara-negara lainnya yaitu, konstitusi Negara Birma terdiri dari 234 Pasal, Konstitusi negara Panama terdiri dari 291 Pasal, Konstitusi negara India bahkan terdiri dari 395 Pasal.

Dikatakan supel artinya walaupun UUD 1945 hanya memuat aturan-aturan pokok saja, senantiasa dapat mengikuti perkembangan yang ada sehingga tidak mudah ketinggalan zaman sehingga UUD 1945 lebih luwes. Bagi suatu negara yang baru merdeka memang lebih baik jika hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok saja. Sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan terlaksananya aturan-aturan pokok itu diserahkan kepada Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lebih mudah cara pembuatannya, mengubah, dan mencabutnya.

### 4.3. Pengertian Kewarganegaraan

Negara sebagai suatu entitas adalah abstrak. Yang tampak adalah unsur-unsur negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat. Rakyat yang tinggal di wilayah negara menjadi penduduk negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negara. Warga negara memiliki hubungan dengan negaranya. Kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa peranan, hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik.

Pemahaman yang baik mengenai hubungan antara warga negara dengan negara sangat penting untuk mengembangkan hubungan yang harmonis, konstruktif, produktif, dan demokratis. Pada akhirnya pola hubungan yang baik antara warga negara dapat mendukung kelangsungan hidup bernegara.

Istilah kewarganegaraan (*citizenship*) memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut :

- a. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara . adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yaitu orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Tanda dari adanya ikatan hukum, misalnya akte kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan dan lain-lain.
2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologi, tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Dengan kata lain, ikatan lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.

Dari sudut kewarganegaraan sosiologis, seseorang dapat dipandang sebagai warga negaranya, sebab ikatan emosional, tingkah laku dan penghayatan hidup yang dilakukannya menunjukkan bahwa orang tersebut sudah seharusnya menjadi anggota negara itu. Namun dari sudut kewarganegaraan yuridis orang tersebut

tidak memenuhi kewarganegaraan yuridis sebab tidak memiliki bukti ikatan hukum dengan negara.

Jadi dari sisi kewarganegaraan sosiologis ada hal yang belum terpenuhi yaitu persyaratan yuridis yang merupakan ikatan formal orang tersebut dengan negara. Di sisi lain terdapat orang yang memiliki kewarganegaraan dalam arti yuridis, namun tidak memiliki kewarganegaraan dalam sosiologis, ia memiliki tanda ikatan hukum dengan negara, tetapi ikatan emosional dan penghayatan hidupnya sebagai warga negara tidak ada, jadi ada kalanya terdapat seorang warga negara hanya secara yuridis saja sebagai warga negara, sedangkan secara sosiologis belum memenuhi. Adalah sangat ideal apabila seorang warga negara memiliki persyaratan yuridis dan sosiologis sebagai anggota dari negara.

- b. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil
  1. Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah

kewarganegaraan berada pada hukum publik.

2. Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

#### **4.4. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia**

##### **4.4.1. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara**

Wujud hubungan antara warga negara dengan negara pada umumnya berupa peranan (*role*). Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga negara. Secara teori status warga negaera meliputi status pasif, aktif, negatif, dan positif. Peranan warga negara juga meliputi peranan yang pasif, aktif, negatif, dan positif. (Wandi Pratama, 2020:85).

Peranan pasif adalah kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peranan aktif merupakan aktivitas warga negara untuk terlibat (berpartisipasi) serta ambil bagian dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mempengaruhi keputusan publik. Peranan positif

merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peranan negatif merupakan aktivitas warga negara untuk menolak campur tangan negara dalam persoalan pribadi.

Di Indonesia hubungan antara warga negara dengan negara telah diatur dalam UUD 1945. Hubungan antara warga negara dengan negara Indonesia tersebut digambarkan dengan baik dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban. Baik itu hak dan kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak dan kewajiban negara terhadap warganya.

#### **4.4.2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia**

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. a.Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
- b. Hak membela negara. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
- c. Hak berpendapat (Pasal 28 UUD1945)

- d. Hak kemerdekaan memeluk agama (Pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945)
- e. Hak dan kewajiban membela negara (Pasal 30 ayat (1) UUD 1945)
- f. Hak dan kewajiban membela negara (Pasal 30 ayat (1) UUD 1945)
- g. Hak untuk mendapatkan pengajaran (Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945)
- h. Hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia (Pasal 32 UUD 1945)
- i. Hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial (Pasal 33 ayat (1),(2), (3), (4), dan (5) UUD 1945)
- j. hak mendapatkan jaminan keadilan sosial (Pasal 34 UUD 1945)

Di samping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 perubahan pertama telah dicantumkan adanya hak asasi manusia. Ketentuan mengenai hak asasi manusia ini merupakan langkah maju dari bangsa Indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis. Ketentuan mengenai hak asasi manusia tertuang pada Pasal 28 A sampai J UUD



1945. Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan adanya kewajiban dasar manusia.

Selanjutnya hak-hak warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara dinamakan hak konstitusional. setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana yang ada dalam UUD 1945. Warga negara berhak menggugat bila ada pihak-pihak lain yang berupaya membatasi atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya.

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan kewajiban dan hak warga negara terhadap negara.

Beberapa ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan
- b. Hak negara untuk dibela
- c. Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
- d. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil.

- e. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
- f. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
- g. Kewajiban negara memberi jaminan sosial
- h. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

Selain adanya hak dan kewajiban warga negara di dalam UUD 1945, tercantum pula adanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia perlu dibedakan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Munculnya hak ini adalah karena adanya ketentuan undang-undang dan berlaku bagi orang yang berstatus sebagai warga negara. Bisa terjadi hak dan kewajiban warga negara Indonesia berbeda dengan hak warga negara Malaysia oleh karena ketentuan undang-undang yang berbeda. Adapun hak asasi manusia umumnya merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara tetapi justru harus dijamin keberadaannya oleh negara.



# **BAB V**

## **PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

### **5.1. Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pembentukan Karakter Bangsa**

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pembentukan karakter bangsa sangatlah penting karena menyangkut pembentukan identitas, nilai, dan perilaku warga negara. Berikut adalah beberapa peran kunci Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa:

1. Membangun Kesadaran dan Identitas Kebangsaan
  - Pengenalan terhadap Nilai-nilai Pancasila: Pendidikan Kewarganegaraan membantu siswa memahami nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika bangsa.
  - Memahami Sejarah dan Perkembangan Bangsa: Menyampaikan pemahaman yang benar mengenai sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang membentuk identitas bangsa.
2. Mendorong Partisipasi dan Keterlibatan Aktif

- Pembelajaran Partisipatif: Melalui diskusi dan simulasi, siswa diajak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi negara.
  - Pengembangan Kemampuan Berdemokrasi: Mendorong kemampuan siswa dalam berdemokrasi, berpikir kritis, dan memahami pentingnya partisipasi dalam pembangunan negara.
3. Peningkatan Keterampilan Sosial dan Moral
- Mengajarkan Etika dan Keadilan: Memperkenalkan konsep-konsep moral dan etika, serta pentingnya keadilan dalam berinteraksi sosial.
  - Pengembangan Keterampilan Komunikasi dan Kemitraan: Membantu siswa dalam membangun keterampilan komunikasi yang baik, kerjasama, serta menghargai perbedaan.
4. Membangun Kesadaran Multikultural dan Toleransi
- Pendidikan Multikulturalisme: Mengajarkan pentingnya menghormati dan menerima keberagaman budaya, agama, dan etnisitas dalam masyarakat.

- Pengembangan Toleransi: Mendorong siswa untuk memiliki sikap toleran terhadap perbedaan dan menghargai keragaman.
5. Menanamkan Tanggung Jawab Kewarganegaraan
- Pemberdayaan Masyarakat: Mengajarkan siswa tentang peran aktifnya sebagai bagian dari masyarakat dalam menjaga dan membangun negara.
  - Pentingnya Kepedulian Sosial: Menanamkan rasa tanggung jawab sosial dan pentingnya kontribusi positif bagi masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter bangsa dengan mengajarkan nilai-nilai moral, sosial, dan kewarganegaraan yang esensial bagi perkembangan warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

## **5.2. Sejarah Perkembangan Negara dan Sistem Politik**

Sejarah perkembangan negara dan sistem politik meliputi rentang waktu dan evolusi struktur politik dari

masa lampau hingga saat ini. Berikut poin-poin utama yang bisa mencakup topik ini:

1. Periode Awal dan Pembentukan Negara
  - Kondisi Awal Masyarakat Pra-negara: Mengenai keadaan sosial, ekonomi, dan politik sebelum pembentukan negara.
  - Proses Pembentukan Negara: Masa-masa awal terbentuknya suatu entitas politik dan sistem pemerintahan.
  - Kerajaan atau Kekaisaran Awal: Periode awal pemerintahan yang mungkin bersifat monarki atau kesultanan.
2. Perkembangan Sistem Politik
  - Sistem Politik Feodal atau Monarki: Pemerintahan yang didasarkan pada monarki, kekuasaan keluarga kerajaan, atau aristokrasi.
  - Revolusi Politik: Periode perubahan besar dalam sistem politik, seperti revolusi, perubahan rezim, atau perang kemerdekaan.
3. Sistem Politik Kontemporer
  - Sistem Politik Demokratis: Perkembangan menuju sistem pemerintahan yang

demokratis, termasuk perubahan konstitusi dan kebijakan politik.

- Pengenalan Institusi Pemerintahan Modern: Pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan seperti parlemen, presiden, atau kongres.
- Globalisasi dan Pengaruhnya: Dampak globalisasi terhadap sistem politik suatu negara.

#### 4. Perubahan Politik Signifikan

- Perubahan Politik Penting: Revolusi, perubahan struktural, atau reformasi politik yang mempengaruhi arah suatu negara.
- Peran Politik dalam Konflik: Peran politik dalam konflik internal dan eksternal serta penyelesaiannya.

#### 5. Sistem Politik dan Pemerintahan Saat Ini

- Kondisi Politik dan Pemerintahan Sekarang: Struktur politik, partai politik, dan sistem pemerintahan saat ini.
- Tantangan Politik Masa Kini: Masalah politik yang dihadapi saat ini, seperti isu kesejahteraan, hak asasi manusia, atau konflik regional.



Perjalanan sejarah perkembangan sistem politik suatu negara memberikan pemahaman mendalam tentang evolusi kebijakan, pemerintahan, dan dinamika politik yang mempengaruhi dan membentuk identitas politik suatu bangsa.

### **5.3. Hukum dan Keadilan dalam Kewarganegaraan**

Hukum dan keadilan merupakan fondasi utama dalam konteks kewarganegaraan yang efektif. Ini berhubungan dengan bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana keadilan dirasakan oleh warga negara. Berikut poin-poin kunci yang relevan dalam topik ini:

1. Prinsip Hukum dalam Kewarganegaraan
  - Kedudukan Hukum dalam Masyarakat: Bagaimana hukum memainkan peran penting dalam menjaga tatanan sosial dan mencegah ketidakadilan.
  - Sistem Hukum Nasional: Pengenalan terhadap sistem hukum suatu negara dan peran lembaga hukum dalam melindungi hak dan kewajiban warga negara.
2. Akses Terhadap Keadilan

- Kesetaraan di Mata Hukum: Pentingnya semua individu diperlakukan sama di depan hukum tanpa kecuali.
  - Akses Terhadap Sistem Peradilan: Bagaimana warga negara memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan untuk menegakkan hak-haknya.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- Perlindungan Hak Asasi: Pentingnya hukum dalam melindungi dan menegakkan hak-hak dasar manusia.
  - Isu-isu Keadilan Sosial: Upaya hukum dalam menanggapi masalah ketidakadilan sosial dan memberikan perlindungan bagi kelompok yang rentan.
4. Penegakan Hukum
- Penerapan Hukum: Pentingnya penerapan hukum secara adil dan konsisten untuk menjaga keteraturan masyarakat.
  - Ketegasan Hukum: Bagaimana kepastian hukum berkontribusi terhadap keadilan dan stabilitas sosial.
5. Tantangan dalam Kewarganegaraan

- Ketidaksetaraan Akses Keadilan: Masalah akses terhadap sistem peradilan yang tidak merata bagi sebagian warga negara.
- Konflik antara Hukum dan Etika: Tantangan dalam menemukan keseimbangan antara penerapan hukum dan nilai-nilai etika dalam masyarakat.

Hukum dan keadilan merupakan landasan yang sangat penting dalam pembentukan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban serta memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga negara.

#### **5.4. Pendidikan Politik dan Partisipasi Warga Negara**

Pendidikan politik dan partisipasi warga negara merupakan elemen kunci dalam membangun masyarakat yang aktif secara politik dan bertanggung jawab. Berikut adalah poin-poin penting terkait dengan pendidikan politik dan partisipasi warga negara:

##### **1. Pendidikan Politik**

- Pengertian Pendidikan Politik: Mengenalkan konsep dan proses politik kepada

masyarakat, baik di sekolah maupun di luar lingkungan formal.

- Tujuan Pendidikan Politik: Mendorong kesadaran politik, pengetahuan akan hak-hak dan kewajiban warga negara, serta memahami sistem politik dan pemerintahan.

## 2. Peran Sekolah dalam Pendidikan Politik

- Kurikulum Pendidikan Politik: Integrasi materi pembelajaran tentang politik, pemerintahan, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam kurikulum sekolah.
- Pelatihan Keterampilan Politik: Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analisis, dan partisipasi dalam proses politik.

## 3. Partisipasi Warga Negara

- Partisipasi Politik: Mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, seperti pemilihan umum, pemungutan suara, atau kampanye politik.
- Keterlibatan dalam Masyarakat: Memotivasi warga negara untuk terlibat dalam masalah-masalah lokal dan isu-isu sosial yang penting.

#### 4. Tantangan dalam Pendidikan Politik dan Partisipasi Warga Negara

- Kurangnya Pengetahuan Politik: Tantangan dalam memberikan pengetahuan yang memadai tentang proses politik kepada masyarakat.
- Keterlibatan yang Rendah: Menjadi tantangan menggerakkan partisipasi yang lebih aktif dari sebagian besar masyarakat dalam proses politik.

#### 5. Peran Media dan Teknologi

- Peran Media Sosial: Bagaimana media sosial memengaruhi pemahaman politik dan partisipasi warga negara.
- Pemanfaatan Teknologi: Bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan politik dan partisipasi.

Pendidikan politik dan partisipasi warga negara memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi dan membangun masyarakat yang lebih terlibat dalam proses politik. Hal ini penting untuk membentuk kesadaran politik dan menjaga kestabilan demokrasi dalam suatu negara.

## 5.5. Multikulturalisme dan Toleransi

Multikulturalisme dan toleransi adalah aspek penting dalam masyarakat yang heterogen secara budaya. Berikut adalah poin-poin terkait multikulturalisme dan toleransi:

### 1. Pengertian Multikulturalisme

- **Keanekaragaman Budaya:** Mengakui adanya keragaman budaya, bahasa, agama, dan tradisi di dalam suatu masyarakat.
- **Penerimaan Terhadap Perbedaan:** Memahami dan menghargai perbedaan serta keberagaman yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat.

### 2. Pentingnya Toleransi

- **Arti Toleransi:** Memiliki sikap terbuka dan menghormati perbedaan tanpa adanya diskriminasi.
- **Pentingnya Kerjasama dan Pengertian:** Memahami bahwa kerjasama dan pengertian antarbudaya dapat memperkuat masyarakat yang majemuk.

### 3. Manfaat Multikulturalisme

- **Kaya Akan Perspektif:** Menawarkan berbagai perspektif dan pengalaman yang

dapat memperkaya pemahaman dan wawasan.

- Inovasi dan Kreativitas: Masyarakat multikultural sering kali menjadi sumber inovasi dan kreativitas yang besar.

#### 4. Tantangan dalam Masyarakat Multikultural

- Konflik Budaya: Potensi konflik antara kelompok-kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda.
- Integrasi dan Identitas: Tantangan untuk mempertahankan identitas budaya sambil mengintegrasikan diri ke dalam masyarakat yang lebih luas.

#### 5. Faktor-faktor Pendorong Toleransi

- Pendidikan Multikultural: Memperkenalkan nilai-nilai toleransi sejak dini dalam pendidikan.
- Kesadaran akan Kebutuhan akan Toleransi: Memahami bahwa toleransi adalah pondasi yang kuat untuk keharmonisan sosial.

#### 6. Peran Pemerintah dan Pendidikan

- Pemerintah dan Kebijakan Multikultural: Bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendukung keberhasilan masyarakat multikultural.

- Pendidikan Toleransi: Memperkenalkan pendidikan yang mengajarkan toleransi dan menghormati keberagaman.

Multikulturalisme dan toleransi memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana perbedaan budaya dihargai dan diterima. Ini adalah fondasi bagi kerukunan sosial dan kehidupan bersama yang damai dalam masyarakat yang majemuk.

## **5.6. Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Kewarganegaraan**

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kewarganegaraan adalah kunci penting dalam membangun masyarakat yang aktif, bertanggung jawab, dan berperan dalam proses pembangunan negara. Berikut beberapa poin terkait dengan hal ini:

1. Partisipasi Aktif Warga Negara
  - Partisipasi dalam Keputusan Publik: Melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya.
  - Keterlibatan dalam Komunitas: Berkontribusi dalam kegiatan sosial, keagamaan, atau kemasyarakatan.



2. Pendidikan dan Kesadaran Kewarganegaraan
  - Pendidikan tentang Kewarganegaraan: Membangun kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran sebagai warga negara.
  - Pengenalan Nilai-nilai Kewarganegaraan: Memahami pentingnya nilai-nilai seperti partisipasi, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif.
3. Kerja Sama Antar Komunitas
  - Kerjasama antar Lembaga Masyarakat: Kolaborasi antar kelompok atau lembaga untuk tujuan sosial, budaya, atau ekonomi.
  - Mengatasi Perbedaan: Menyelesaikan konflik atau menciptakan dialog antar kelompok yang berbeda.
4. Partisipasi dalam Kebijakan Publik
  - Proses Pembuatan Kebijakan: Terlibat dalam penyusunan dan penilaian kebijakan pemerintah.
  - Mekanisme Partisipasi Publik: Menyampaikan pendapat atau masukan melalui forum publik atau lembaga resmi.
5. Peran Sektor Swasta dan Organisasi Non-Pemerintah

- Kemitraan dengan Sektor Swasta: Kolaborasi dengan bisnis untuk proyek-proyek sosial atau pembangunan.
  - Peran Organisasi Non-Pemerintah: Berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan kewarganegaraan aktif.
6. Penggunaan Teknologi dan Media Sosial
- Media Sosial sebagai Sarana Partisipasi: Memanfaatkan platform media sosial untuk menyebarkan informasi atau memobilisasi partisipasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kewarganegaraan menciptakan iklim sosial yang inklusif, memperkuat demokrasi, dan membangun keberlanjutan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.



# **BAB VI**

## **KONSEP NASIONALISME**

### **6.1. Pengenalan tentang Nasionalisme**

Nasionalisme merujuk pada ideologi atau gerakan yang menekankan pentingnya identitas nasional atau kesetiaan pada suatu bangsa atau negara. Ini melibatkan keyakinan bahwa kepentingan dan kesatuan nasional harus diutamakan di atas kepentingan individu atau kelompok yang lebih kecil.

Pengertian Nasionalisme:

- **Identitas dan Kebangsaan:** Nasionalisme melibatkan identifikasi dan loyalitas yang kuat terhadap identitas budaya, bahasa, sejarah, atau nilai-nilai bersama suatu kelompok yang membentuk bangsa atau negara.
- **Pentingnya Satu Entitas Politik:** Nasionalisme mempromosikan ide bahwa suatu kelompok etnis, budaya, atau bahasa memiliki hak untuk membentuk atau memiliki entitas politik yang independen atau otonom.
- **Manifestasi Politik dan Sosial:** Ini sering kali tercermin dalam gerakan politik, revolusi, atau

kampanye untuk meraih kemerdekaan atau untuk mempertahankan identitas nasional dalam konteks politik atau budaya yang lebih luas.

- Konsep Solidaritas dan Kesatuan: Nasionalisme mendorong solidaritas di antara anggota kelompok atau bangsa yang sama, sering kali dengan penekanan pada kesatuan dan kebanggaan akan identitas bersama.

Namun, penting untuk diingat bahwa sifat nasionalisme dapat bervariasi dari pemahaman identitas budaya dan rasa solidaritas hingga bentuk yang lebih ekstrem, seperti chauvinisme atau intoleransi terhadap kelompok lain. Sementara dalam beberapa kasus, nasionalisme bisa menjadi kekuatan positif yang menyatukan masyarakat, di sisi lain, dapat pula menjadi sumber konflik jika diarahkan pada penekanan atas keunggulan atau penolakan terhadap kelompok lain.

## **6.2. Asal Usul dan Sejarah**

Sejarah nasionalisme berasal dari perkembangan kompleks dari berbagai peristiwa historis, sosial, dan politik di seluruh dunia. Asal-usul nasionalisme dapat ditelusuri kembali ke periode pasca-renaissance di

Eropa, tetapi ide-ide dan gerakan yang mendukung identitas nasional telah muncul di banyak wilayah dunia.

Asal Usul dan Sejarah Nasionalisme:

1. Awal Munculnya Konsep Identitas Nasional: Pada abad ke-18 dan ke-19 di Eropa, ide-ide nasionalisme mulai muncul dengan kuat, terutama dalam konteks perjuangan untuk kemerdekaan politik dan pembentukan negara-negara modern.
2. Pengaruh Revolusi dan Pemikir Pencerahan: Revolusi Prancis dan Amerika, serta pemikir-pemikir Pencerahan seperti Rousseau, memainkan peran penting dalam menggugah kesadaran akan konsep identitas nasional.
3. Perkembangan Politik dan Bangkitnya Negara-Negara Modern: Proses pembentukan negara-negara modern di Eropa dan gerakan unifikasi seperti Italia dan Jerman menguatkan gagasan identitas nasional.
4. Dampak Kolonialisme dan Dekolonisasi: Di luar Eropa, konsep nasionalisme juga dipicu oleh pengalaman kolonialisme dan upaya-upaya dekolonisasi pada abad ke-20.

Meskipun asal-usulnya dapat ditelusuri ke Eropa, konsep identitas nasional dan gerakan nasionalisme telah berkembang di seluruh dunia, memainkan peran yang signifikan dalam sejarah politik dan sosial banyak negara. Seiring waktu, sejarah dan dinamika nasionalisme terus berubah dan beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan budaya.

### **6.3. Teori Nasionalisme: Perspektif Historis, Sosiologis, dan Politis**

Teori nasionalisme melibatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep ini dari berbagai perspektif, seperti sejarah, sosiologi, dan politik. Berikut adalah gambaran singkat tentang teori nasionalisme dari sudut pandang berbagai disiplin ilmu:

1. **Perspektif Historis:** Teori historis melacak asal-usul dan evolusi nasionalisme, menyoroti peristiwa-peristiwa sejarah yang memicu timbulnya identitas nasional dan pembentukan negara-negara modern. Pemikiran dari pemikir Pencerahan, revolusi politik, hingga proses unifikasi di Eropa menjadi fokus utama.
2. **Perspektif Sosiologis:** Dari segi sosiologis, teori nasionalisme meneliti bagaimana identitas nasional dibangun dan dipertahankan dalam

masyarakat. Hal ini termasuk cara identitas budaya, simbol-simbol, dan bahasa digunakan untuk memperkuat kesatuan sosial.

3. Perspektif Politis: Dalam politik, teori nasionalisme menganalisis bagaimana gerakan nasionalisme memengaruhi politik dan kekuasaan, baik di tingkat domestik maupun dalam hubungan internasional. Hal ini mencakup implikasi nasionalisme dalam pembentukan kebijakan, konflik, dan dinamika hubungan antarnegara.

Teori-teori ini sering berinteraksi satu sama lain dan memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek nasionalisme dari sudut pandang yang berbeda. Pendekatan multidisiplin ini memungkinkan pemahaman yang lebih kaya tentang kompleksitas konsep nasionalisme.

#### **6.4. Nasionalisme dalam Konteks Global**

Nasionalisme dalam konteks global adalah fenomena kompleks yang memiliki dampak yang signifikan pada dinamika politik, sosial, dan ekonomi di seluruh dunia. Dalam era globalisasi, nasionalisme



memainkan peran penting dalam interaksi antarnegara dan identitas budaya.

1. **Resurgensi Nasionalisme:** Meskipun globalisasi mempromosikan konektivitas dan interdependensi antarbangsa, ada tren resurgensi nasionalisme di banyak negara. Ini dapat tercermin dalam kebangkitan gerakan politik yang menekankan kedaulatan nasional dan identitas budaya.
2. **Nasionalisme dan Identitas Global:** Di tengah arus globalisasi, nasionalisme masih merupakan aspek penting dari identitas global. Identitas nasional memainkan peran dalam cara individu dan kelompok melihat diri mereka dalam konteks dunia yang semakin terhubung.
3. **Konflik dan Kolaborasi:** Nasionalisme juga bisa menjadi pendorong konflik antarnegara karena penekanan pada kepentingan nasional yang berlawanan. Namun, dalam beberapa kasus, nasionalisme juga bisa memperkuat kerja sama dan solidaritas regional dalam menghadapi tantangan global.
4. **Dampak pada Ekonomi dan Politik:** Nasionalisme dapat memengaruhi kebijakan ekonomi dan politik suatu negara, seperti

kebijakan perdagangan, imigrasi, atau diplomasi luar negeri, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi dinamika ekonomi global dan hubungan antarnegara.

Nasionalisme dalam konteks global menunjukkan betapa kompleksnya peran identitas nasional dalam dunia yang semakin terhubung. Meskipun ada upaya untuk integrasi global, nasionalisme tetap menjadi kekuatan yang signifikan dalam dinamika politik dan sosial di banyak belahan dunia.

### **6.5. Peran Nasionalisme dalam Politik dan Konflik**

Peran nasionalisme dalam politik dan konflik memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika politik internal suatu negara maupun dalam hubungan antarnegara. Nasionalisme sering kali menjadi pendorong dalam bentuk-bentuk konflik, baik secara internal maupun di antara negara-negara.

1. **Politik Internal:** Nasionalisme dapat menjadi kekuatan yang mendorong politik dalam negeri, mempengaruhi dinamika pemilihan umum, kebijakan dalam negeri, serta mendefinisikan agenda politik suatu negara.

2. Pemekaran Identitas: Dalam situasi tertentu, nasionalisme dapat dipakai sebagai alat untuk memperkuat identitas budaya dan politik kelompok tertentu, tetapi juga dapat mengabaikan atau menekan kelompok minoritas.
3. Konflik Antar-Negara: Nasionalisme sering kali menjadi penyebab konflik antarnegara, di mana ketegangan antara negara-negara didorong oleh penekanan pada kedaulatan nasional, sumber daya, atau perbedaan ideologi dan kepentingan nasional.
4. Kekerasan Politis: Gerakan nasionalis sering kali menggunakan retorika nasionalisme untuk memperkuat dukungan, bahkan bisa sampai ke tingkat kekerasan politik, baik di dalam negeri maupun dalam konflik antarnegara.
5. Diplomasi dan Hubungan Internasional: Nasionalisme mempengaruhi cara negara berinteraksi dalam hal diplomasi, perjanjian internasional, serta dinamika hubungan antarnegara, baik dalam kerja sama maupun konfrontasi.

Peran nasionalisme dalam politik dan konflik sangat kompleks. Sementara itu bisa menjadi kekuatan penyatuan di dalam negeri, pada saat yang sama, juga dapat menjadi sumber konflik antara kelompok atau negara. Pemahaman yang mendalam tentang peran nasionalisme dalam dinamika politik sangat penting untuk memahami konflik global dan dinamika politik internasional.

## **6.6. Pengaruh dan Dampak Nasionalisme**

Pengaruh dan dampak nasionalisme sangatlah luas, memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun kadang-kadang dapat menjadi faktor penyatuan, nasionalisme juga memiliki dampak yang kompleks dan seringkali kontroversial.

1. **Identitas Kolektif:** Nasionalisme mempengaruhi identitas kolektif suatu kelompok atau bangsa, mengukuhkan rasa kebanggaan akan budaya, sejarah, dan nilai-nilai bersama.
2. **Politik Domestik:** Pengaruh nasionalisme dapat terlihat dalam politik domestik, memengaruhi kebijakan dalam negeri, perundang-undangan, dan dinamika politik antarpantai.
3. **Konflik dan Ketegangan:** Dalam konteks internasional, nasionalisme dapat memicu

konflik dan ketegangan antarnegara, mendorong persaingan atau konfrontasi dalam hal sumber daya, kedaulatan, atau ideologi.

4. Ekonomi: Dalam beberapa kasus, nasionalisme dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi suatu negara, memengaruhi perdagangan, investasi asing, atau perlindungan terhadap industri dalam negeri.
5. Integrasi atau Desintegrasi: Sementara nasionalisme bisa menjadi faktor yang mempersatukan suatu bangsa, dalam beberapa kasus, nasionalisme juga bisa menjadi sumber desintegrasi, memicu perpecahan atau perselisihan internal.
6. Perubahan Sosial dan Budaya: Dampak nasionalisme juga terlihat dalam perubahan sosial dan budaya, memengaruhi cara individu melihat diri mereka sendiri, kelompok mereka, dan orang lain.

Nasionalisme adalah fenomena yang kompleks dengan berbagai dampak yang dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Meskipun sering kali memiliki dampak positif dalam upaya penyatuan suatu

bangsa, nasionalisme juga dapat menjadi sumber konflik dan disintegrasi di tingkat lokal maupun global.

### **6.7. Kritik dan Perdebatan Terhadap Nasionalisme**

Kritik dan perdebatan terhadap nasionalisme muncul dari berbagai perspektif dan menyoroti sisi-sisi negatif serta implikasi kompleks dari fenomena ini. Beberapa kritik terhadap nasionalisme antara lain:

1. **Eksklusivitas dan Diskriminasi:** Nasionalisme sering kali menciptakan identitas eksklusif yang dapat mengabaikan atau menindas kelompok minoritas atau non-nasionalis.
2. **Kesenjangan Global:** Dalam era globalisasi, nasionalisme dapat menguatkan kesenjangan dan konflik antara negara-negara, menghambat kerja sama internasional dan solusi atas masalah global.
3. **Potensi Konflik:** Ketika nasionalisme dipertahankan secara berlebihan, hal itu dapat menjadi sumber konflik, baik di tingkat lokal maupun internasional, memperburuk hubungan antarnegara dan memicu ketegangan politik.
4. **Pembatasan Pergerakan dan Integrasi:** Nasionalisme yang berlebihan dapat membatasi integrasi dan keragaman budaya serta

menghambat pertukaran ide dan inovasi antarnegara.

5. Manipulasi Politik: Nasionalisme sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak politik untuk memanipulasi opini publik dan mendukung agenda politik tertentu.
6. Keterbatasan Identitas: Nasionalisme dapat menyederhanakan identitas manusia menjadi kategori nasional, mengabaikan keberagaman individu dan kompleksitas identitas personal.

Perdebatan seputar nasionalisme melibatkan berbagai sudut pandang dan interpretasi. Sementara bagi beberapa orang nasionalisme adalah faktor penyatuan dan identitas, bagi yang lain, ia bisa menjadi sumber konflik dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa nasionalisme adalah topik yang kompleks yang memunculkan berbagai perspektif dan pandangan.

# **BAB VII**

## **KEBANGSAAN DAN KEBERAGAMAN**

### **BUDAYA**

#### **7.1. Pendahuluan**

Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945 merupakan hasil akhir perjuangan dan pengorbanan dari jiwa dan raga. Dedikasi melalui semangat persatuan dan kesatuan segenap komponen bangsa Indonesia telah dirajut dan disulam dalam rangkaian indah kebhinekaan.

Indonesia memiliki wilayah dengan 17.504 pulau, 1340 suku dan 546 bahasa sehingga merupakan keajaiban yang mengagumkan. Indonesia telah dikenal secara luas sebagai negara majemuk atau plural dengan keberadaan dari budaya, suku, etnis, adat istiadat, dan agama yang beragam (Johana and Widianti, 2020).

Pembangunan Nasional yang dicanangkan telah mengarah pada perwujudan masyarakat yang adil, makmur, dan merata berlandaskan Pancasila. Makna dari pembangunan Nasional merupakan pembinaan manusia Indonesia secara utuh serta nyata. Untuk mencapai tujuan dibutuhkan cara dan strategi konkrit



pembangunan dengan memanusiakan manusia sebagai sentral interaksi aktivitas pembangunan secara spiritual maupun material (Kementrian PPN, 2020).

Pembangunan diarahkan dan berfokus kepada manusia yang merupakan makhluk budaya sebagai sumber daya yang merupakan pondasi dasar warga negara yang berdaulat (Mandagie, 2022). Hal ini mensyaratkan segala upaya nyata dalam pembangunan yang harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia. Peningkatan keyakinan diri untuk bangsa akan menumbuhkan perilaku kehidupan yang relevan serta memiliki kepribadian unik yang akan menunjang dalam pembangunan. Nilai moralitas, etika, dan integrasi sosial yang tinggi akan membuat manusia Indonesia semakin menyadari keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta kehidupan (Dwijendra, 2021).

Pembangunan akan mengantar perubahan pada diri pribadi manusia, komunitas, masyarakat, dan lingkungan hidup sekitar. Perkembangan dunia telah menyebabkan dinamika masyarakat di Indonesia. Perubahan sikap terjadi terhadap nilai budaya saat ini. Perubahan sistem nilai budaya yang memberikan dinamika dalam hubungan interaksi antara manusia di dalam kehidupan masyarakat.

Indonesia memiliki kekayaan multi etnis (suku bangsa) dan setiap etnis mempunyai warisan budaya berbeda yang telah dikenal sejak lama sehingga Indonesia merupakan negara beragam budaya.

Kehadiran berbagai suku bangsa akan membuat keanekaragaman budaya dapat semakin memperkaya serta meningkatkan rasa kepercayaan dan kebanggaan. Melalui keindahan bunga budaya nusantara membuat Indonesia dapat menjadi sebuah miniatur budaya dunia. Keanekaragaman budaya Indonesia telah menciptakan keindahan yang akan memberikan potensi pariwisata. Budaya menjadi sumber inspirasi dan inovasi bagi para konten kreator industri kreatif di berbagai ranah bidang.

Kehidupan berbangsa dan bernegara membuat sikap dan tingkah laku yang harus relevan dengan jati diri bangsa. Indonesia memiliki cita-cita, harapan, dan tujuan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan amanah dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

Kesadaran berbangsa secara kontinyu diupayakan akan dapat meningkatkan dan memelihara rasa persaudaraan sejati, kesatuan dan persatuan bangsa. Indonesia yang memiliki suku bangsa dan tinggal di banyak pulau memiliki kesempatan untuk berekspresi.

Keberadaan suku bangsa yang terbentang dari Sabang - Merauke memperkuat kehidupan masyarakat

plural. Kemajemukan dipersatukan dalam konsep wawasan nusantara dengan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, masyarakat, dan lingkungan berasaskan Pancasila, UUD NRI 1945, dan NKRI.

Kesadaran dapat terus diupayakan dengan cara menumbuhkan rasa kecintaan terhadap jiwa raga dan semangat patriotisme. Hal ini dalam rangka merawat kehidupan bangsa dan negara. Motivasi dan usaha patriotik melalui aktivitas seperti saling membantu, menjaga kerukunan antar agama, suasana hidup toleransi, melaksanakan kewajiban ibadah, berusaha untuk hormat dan menciptakan keamanan bersama.

Kehadiran setiap warga negara diperlukan untuk terus menciptakan kesadaran dan tanggungjawab bersama. Warga negara Indonesia harus secara konsisten menghormati simbol atau lambang negara serta mematuhi peraturan perundang-undangan.

## **7.2. Wawasan Kebangsaan**

Suatu cara pandang mengenai istilah wawasan kebangsaan Indonesia yang diawali melalui pemahaman terhadap ideologis dengan inisiator Presiden Soekarno saat memberikan pidato monumental 1 Juni 1945.

Wawasan kebangsaan negara Indonesia diinisiasi sebelum hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Persoalan

yang utama dan perlu dipahami mengenai keberadaan wawasan kebangsaan telah dipelopori Soekarno melalui pemahaman global pada suatu masa perjuangan yang menuntut kemerdekaan satu bangsa (Prasetyo, 2017).



Gambar 1. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945

<https://www.kompasiana.com/prismasusila/5550162f0523bde71d07d703/bangsa-mu-bagian-dirimu>

Keadaan sekarang dan mendatang akan selalu berubah dan berdinamika berdasarkan situasi nasional dan global yang ikut membentuk dan mempengaruhi cara pandang tentang kebangsaan Indonesia.

Hakikat dalam wawasan kebangsaan pada masa industri 4.0 dan *society 5.0* memberikan kerangka dasar untuk terus dapat berusaha menjawab kompleksitas persoalan bangsa sehingga memungkinkan dikelola atau diupayakan segenap warga dan pemerintah Indonesia.

Perkembangan tata nilai kehidupan berbangsa berjalan secara kontinyu. Dinamika perkembangan berdasarkan nilai terdahulu yang telah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar sehingga saat ini menjadi tidak relevan lagi dalam situasi perubahan zaman (Widiususeno and Sudarsih, 2019).

Presiden Soekarno menyampaikan semangat *“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”* Dinamika dalam perjuangan bangsa tidak hanya terbatas pada kekuatan global tetapi tantangan yang dihadapi adalah kehadiran teknologi, informasi, inovasi, industri dan konsumerisme yang individualistis (Dwijendra, 2021).

Saat ini terdapat kecenderungan masyarakat yang mulai bermigrasi pada budaya dan tata nilai barat. Beberapa tampilan dan layanan melalui media massa telah menggerus kecintaan masyarakat pada budaya lokal. Sikap pragmatis dan apatis telah menjamur dalam kehidupan masyarakat modern. Keberadaan suatu nilai

budaya dan kearifan lokal sudah terusik sehingga sering terjadi ketegangan serta tarik ulur kekuatan antara budaya regional, nasional dan global. Sebuah tantangan tengah kerap terjadi bagi kehidupan bangsa Indonesia dan telah berpengaruh pada jati diri generasi milenial.

Hakikat jati diri sebagai generasi sesama bangsa dan tatanan nasional telah mempengaruhi Pancasila. Dibutuhkan aktualisasi dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara secara konkrit. Pancasila dijadikan sebagai sarana dari berbagai sumber hukum dan *value* Pancasila menjadi dasar produk hukum.

Konsep suatu negara hukum berdasarkan Pancasila merupakan sarana dan tempat terbaik dalam merawat dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar dari tata kelola suatu pemerintahan agar dapat mengatur terselenggaranya suatu negara (Fatmah, Reyza and Aisa Hannum Ritonga, 2020).



Gambar 2. Pidato Bung Karno 1 Juni 1945

Sumber: <https://www.kompas.com/skola/read/202203/29/080000769/pancasila-sebagai-dasar-negara-makna-dan-kedudukannya>

### 7.3. Keberagaman Budaya

Kata keragaman memiliki suatu kata dasar ragam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ragam bermakna (1) sikap, tingkah, laku, cara; (2) macam, jenis; (3) musik, lagu, langgam; (4) warna, corak; (5) laras (tata bahasa). Berdasarkan makna nomor 2 (dua) maka ragam bermakna jenis dan macam. Keragaman menjelaskan banyak jenis dan berbagai macam.

Persamaan kata dari kebudayaan adalah *cultuur* (bahasa Belanda) yang sama arti dengan *culture* (bahasa Inggris) bersumber pada perkataan Latin “*colere*”

memiliki suatu makna mengenai kata kerja mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah dalam bertani.

Berdasarkan persepsi ini berkembanglah arti dari *culture* sebagai “*berbagai daya upaya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan membentuk alam*”. Pada sudut pandang bahasa Indonesia maka kebudayaan bersumber dari bahasa Sanssekerta “*budhhayah*”, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang bermakna budi atau akal.

Keragaman budaya memiliki banyak jenis dan berbagai macam dari keberadaan budaya yang dirintis oleh manusia seperti terdapat dalam ilmu pengetahuan dan banyak barang yang diciptaan oleh manusia dalam rangka untuk membantu aktivitas kehidupan.

Keberagaman budaya merupakan hal yang unik dalam kehidupan manusia di dunia dengan keberadaan suku bangsa. Keberagaman budaya Indonesia telah memberi warna tersendiri terhadap keberagaman di dunia yang penuh dengan keanekaragaman hayati dan tempat tinggal. Setiap warga negara Indonesia harus menyadari bahwa keberagaman yang dimiliki harus dipelihara dan dijaga dengan baik. Kemerdekaan Negara Indonesia telah menghasilkan keberagaman yang tidak terkira jumlah dan macam yang terdiri dari ras, suku, budaya, bahasa, lagu dan agama (Sihati *et al.*, 2022).



Keberagaman telah melahirkan budaya Indonesia yang semakin kaya dan tidak tertandingi di belahan dunia. Indonesia memiliki rumah adat unik, upacara adat kreatif, pakaian adat tradisional berseni, tarian adat tradisional yang menarik, warna alat musik dan lagu khas tradisional daerah, senjata jenis tradisional kreasi, hingga bermacam makanan khas yang menawan lidah.

Keberadaan Bhineka Tunggal Ika merupakan identitas jati diri bangsa di tengah arus modernisasi. Istilah *unity in diversity* merupakan keberagaman yang terdapat dalam suatu bentuk kondisi yang religius dan memiliki spiritual yang sangat indah. Keberagaman wajib diterima oleh segenap lapisan bangsa dan sebagai dasar untuk membangun komunikasi efektif.

Keberagaman budaya mendukung dan memberi peluang serta ruang dalam meningkatkan persatuan dan memperkuat persaudaraan sejati di tengah perbedaan. Keberagaman terkait dengan budaya yang merawat suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Keberagaman harus dapat terhindar dari isu SARA dengan stigma negatif yang berujung pada konflik. Indonesia perlu membangun kesadaran bersama untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan terdapat intervensi pemerintah bersama dukungan seluruh komponen masyarakat (Suyahmo, 2022).

Perspektif dalam konteks ilmu sosiologi dan antropologi menampilkan keberagaman yang terdiri dari berbagai sikap dengan karakter etnosentris dan antroposentris yang mengakibatkan paradigma negatif terhadap perbedaan (Wedasuwari, 2020).

Keberagaman budaya Indonesia merupakan harta kekayaan yang berlimpah dalam kacamata Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Keberadaan kebudayaan lokal memberikan kesempatan untuk dapat bertumbuh dan berkembang dalam perbedaan yang ada. Kehadiran keberagaman budaya berpengaruh positif apabila dimaknai benar dan secara sadar berupaya menjaga dan merawat di sekitar kehidupan masyarakat untuk menciptakan kebudayaan itu sendiri (Nahak, 2019).

Perkembangan budaya memiliki peran dan fungsi dalam meningkatkan semangat nasionalis yang tinggi. Budaya lokal memuat nilai sosial yang perlu dijalankan oleh setiap masyarakat Indonesia (Normina, 2017).



Gambar 3. Makna Bhineka Tunggal Ika

Sumber: <https://fkip.umsu.ac.id/2023/07/25/sejarah-dan-makna-bhineka-tunggal-ika/>

#### 7.4. Tantangan

Keberagaman budaya akan menjadi persoalan ketika masyarakat Indonesia tidak dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya. Berikut tantangan yang dihadapi dewasa ini, yaitu:

a. Individualisme

Paham yang menyatakan setiap individu harus lebih penting dan utama dari secara masyarakat umum.

b. Pluralisme

Terdapat cara pandang yang hidup, memiliki sebuah keyakinan, agama, ideologi, dan kemajemukan.

c. Kontrak Sosial

Perjanjian antara rakyat dengan pemimpin, atau antara manusia yang tergabung dalam komunitas.

d. Hedonisme

Pandangan yang telah menganggap bahwa setiap kesenangan dan kenikmatan dalam bentuk materi merupakan tujuan utama.

e. Fundamentalisme

Paham yang memperjuangkan kembali norma dan keyakinan agama lokal untuk sekularisme.

f. Budaya Multimedia

Penggunaan terhadap perangkat multimedia dalam kehidupan dan aktivitas manusia.

g. Nihilisme Orang Muda

Konsep hidup yang membuat suatu kehidupan tidak memiliki makna tertentu bagi orang muda.

h. Persoalan Ekologi

Kerusakan terhadap keberadaan lingkungan sekitar, *ekosistem*, tumbuhan, pencemaran air dan udara.

## 7.5. Penutup

Kehidupan berbangsa dan bernegara membuat sikap dan tingkah laku yang harus relevan dengan jati

diri bangsa yang memiliki cita-cita, harapan, dan tujuan hidup yang sesuai dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

# **BAB VIII**

## **GLOBALISASI DAN TANTANGAN MEMBENTUK IDENTITAS NASIONAL**

### **8.1. Globalisasi**

Menurut Huntington (1996), globalisasi membawa perubahan dalam cara individu mengidentifikasi diri mereka, dengan memperkenalkan unsur-unsur budaya dan nilai yang berasal dari berbagai belahan dunia. Dari peran pendidikan, pengaruh media sosial, hingga upaya sosialisasi, semua elemen tersebut saling terkait dan berkontribusi dalam membangun identitas nasional yang kuat dan tak tergoyahkan. Pemahaman yang lebih baik tentang identitas nasional memperkuat jati diri suatu bangsa.

Menurut Grew (dalam Lestari 2018) globalisasi secara luas dipahami sebagai peregangannya kegiatan sosial, politik dan ekonomi lintas batas sehingga kejadian, keputusan dan kegiatan yang berlangsung di suatu tempat atau suatu wilayah memiliki arti penting bagi masyarakat keseluruhan. Kemudian pengertian secara luas globalisasi adalah proses pertumbuhan negara-negara maju (Amerika, Eropa dan Jepang)

melakukan ekspansi besar-besaran, Kemudian berusaha mendominasi dunia dengan kekuatan teknologi, ilmu pengetahuan, politik, budaya, militer dan ekonomi.

Pengertian lain dikemukakan oleh globalisasi menurut Robertson (1992), yang mengacu pada penyempitan dunia secara insentif dan peningkatan kesadaran kita akan dunia, yaitu semakin meningkatnya koneksi global dan pemahaman kita akan koneksi tersebut (Suneki, 2012). Proses penyempitan dunia dapat dipahami dalam konteks institusi modernitas dan intensifikasi kesadaran dunia dapat dipersepsikan refleksif dengan lebih baik secara budaya.

Globalisasi telah mengaburkan batas-batas negara seolah-olah semua menjadi satu. Sedangkan secara budaya manusia akan cenderung hidup bersama manusia yang lain dalam lingkup budaya yang sama. Maka dari itu globalisasi membawa dampak menguatnya identitas nasional.

## **8.2. Hakikat Identitas Nasional**

Identitas Nasional secara etimologi, terdiri dari dua kata. Pertama kata "identitas" yang berarti penanda, atau penciri sesuatu. Kedua "nasional" berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Berdasarkan arti yang terdapat

di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, identitas nasional dengan demikian dapat diartikan sebagai ciri-ciri, segala perasaan, atau sifat-sifat kebangsaan yang berasal dari bangsa itu sendiri.

Identitas nasional dengan demikian mencakup dua aspek. Pertama adalah aspek ciri khas. Identitas nasional selalu merupakan representasi dari keadaan suatu bangsa. Identitas adalah gambaran yang mewakili keadaan dari bangsa tersebut. Kedua, identitas nasional juga merupakan pembeda dari bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Di samping menunjukkan ciri-ciri yang merepresentasikan keadaan suatu bangsa, identitas juga harus menunjukkan kekhasan bangsa tersebut dibandingkan dengan bangsa yang lain sehingga dengan identitas tersebut, bangsa yang bersangkutan menunjukkan perbedaannya dengan bangsa yang lain, Inilah dua aspek yang penting di dalam identitas nasional.

Identitas Nasional secara terminologi diartikan sebagai tanda atau sifat atau jati diri yang melekat pada suatu bangsa yang membedakan setiap negara. Notonagoro (1971) Menyatakan identitas nasional berkaitan dengan pengertian bangsa. Sedangkan bangsa sendiri diartikan sebagai ikatan yang bersifat primordialisme. Sebagai contoh Identitas nasional



Indonesia adalah ciri khas bangsa Indonesia, yaitu manifestasi atau penjelmaan hakikat pribadi kemanusiaan universal yang dilekati kualitas-kualitas dan sifat-sifat khusus ciri khas bangsa Indonesia. Kaelan (2002) Menjelaskan bahwa inti identitas nasional bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia.

Identitas nasional sebagai jati diri dikemukakan oleh Hadi (2002) bahwa jati diri itu mencakup tiga unsur yaitu identitas, kepribadian, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian (sikap dan perilaku) yang mencerminkan lima nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya, tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati. Pancasila sebagai kepribadian yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku akan dapat teramati dan dinilai oleh orang lain dalam kehidupan dan lingkungannya.

Sebagai sebuah penciri, sebuah identitas melekat pada status manusia itu sendiri. Contoh sebagai warga negara Indonesia memiliki identitas sebagai warga

negara Indonesia ia memiliki paspor Warga Negara Indonesia, ia memiliki KTP sebagai penduduk Indonesia, ia berbahasa Indonesia dan lain-sebagainya.

Identitas selain melekat ia juga harus selalu dikuatkan karena bisa terlupa ketika identitas bukan suatu kesadaran namun keharusan. Contoh sebagai bangsa Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup. Maka tidak bisa lahir sebagai rakyat Indonesia langsung mampu mengamalkan sehingga perlu diajarkan, dan terus dikuatkan untuk mampu menjadi karakter.

### **8.3. Tantangan Membentuk Identitas Nasional**

Pengaruh globalisasi tidak dapat dihindari oleh siapapun di mana pun. Menurut pandangan Suneki (2012) globalisasi tidak lain merupakan kapitalisme dalam bentuk yang paling modern. Pelopornya adalah negara-negara maju. Ia juga pengendali jalannya arus globalisasi. Dikatakan sebagai pengendali karena ia yang sebetulnya beruntung dengan adanya globalisasi. Seperti halnya negara Amerika Serikat yang merupakan negara yang mampu bersaing dalam hal teknologi dan informasi.

Globalisasi juga sering disebut dengan proses “westernisasi” (Safri, 2011). Hal ini dikarenakan pada

dasarnya, penyebarluasan pengaruh globalisasi tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dan cepat di daerah barat yang di dominasi oleh negara-negara maju. Hal ini mengakibatkan negara-negara maju bersaing dalam memberikan pengaruh juga menyebarluaskan budaya lokal mereka ke seluruh penjuru dunia melalui globalisasi.

Negara Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya hanya mendapat pengaruhnya saja. Karena pada dasarnya, negara-negara berkembang memiliki daya kompetitif yang rendah.

Sebenarnya globalisasi tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga memberikan dampak positif. Sebagai contoh adanya revolusi industri 4.0 yang terjadi secara global memiliki banyak dampak positif seperti semakin canggihnya teknologi dan pesatnya digitalisasi yang terjadi diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia (Sudargini, dan Purwanto, 2020).

Di Indonesia sendiri, kemajuan teknologi ini tidak hanya membawa dampak positif, namun juga negatif dalam interaksi sosialnya karena komunikasi terjalin secara tidak langsung. Komunikasi yang berlangsung melalui sosial media dapat diinterpretasikan beragam

sesuai penerima pesan padahal bisa jadi pesan yang diberikan tidak seperti interpretasinya.

Pengaruh budaya, agama, politik, ideologi, kebiasaan, dan suasana hati dapat mempengaruhi komunikasi antar manusia. Apabila terjadi miskomunikasi atau tidak dipahaminya pesan maka kemudian dapat menyebabkan konflik antar individu bahkan bisa meluas menjadi konflik sosial. Dalam kondisi yang telah disebutkan di atas, konflik yang terjadi di antara masyarakat ini dilatari oleh keragaman dan perbedaan latar belakang individu di masyarakat, yang di dalamnya terdiri dari keragaman etnis, suku, budaya, agama, ras, gender, dan kondisi fisik maupun psikis individu (mood, mental, keadaan) yang merupakan penguatan dari identitas. Globalisasi kemudian menjadi tantangan bagi pembentukan dan menguatnya identitas nasional. Menguatnya identitas nasional menjadikan globalisasi membawa dampak meluasnya diskriminasi dan radikalisme dalam masyarakat.

Globalisasi sebagai tantangan pembentukan identitas nasional mengarah pada lunturnya berbagai budaya daerah di atas nama globalisasi. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2016, terdapat 11 bahasa daerah kita yang sudah

mengalami kepunahan. Bahasa Hukumina, Kayeli, Piru, Moksela, Ternateno, Nila, Palumatu, Te'un, Mapia, Tandia, Tobada' yang merupakan bahasa daerah di wilayah maluku dan papua (Badan Pengembangan dan pembinaan bahasa, 2016). Faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan berbagaibahasa daerah tersebut adalah dampak globalisasi, adanya sikap mayoritas dan minoritas, kurangnya minat generasi muda kita untuk belajar bahasa daerah yang merupakan warisan leluhurnya. Sementara itu menurut Kepala Badan Bahasa kemendikbud Dadang Sunendar pada tahun 2018, bahwa 19 bahasa daerah terancam punah, empat bahasa kritis, dua bahasa mengalami kemunduran, 16 bahasa dalam kondisi rentan, dan 19 berstatus aman (Sunendar, 2018). Maka dari itu penting adanya toleransi dan multikulturalisme.

# **BAB IX**

## **GLOBALISASI DAN TANTANGAN TERHADAP NASIONALISME**

### **9.1. Definisi Globalisasi**

Globalisasi adalah proses integrasi dan interkoneksi yang melibatkan interaksi antara berbagai aspek kehidupan manusia di seluruh dunia. Hal ini meliputi pertukaran informasi, budaya, teknologi, barang, jasa, dan modal secara cepat dan intensif antara negara-negara serta komunitas-komunitas di berbagai belahan dunia.

Secara umum, globalisasi merujuk pada fenomena di mana batasan-batasan geografis, politik, ekonomi, dan budaya semakin berkurang, memungkinkan terciptanya hubungan yang lebih erat dan kompleks antara individu, perusahaan, dan negara-negara di dunia. Faktor-faktor seperti kemajuan teknologi informasi, perdagangan internasional, investasi lintas batas, migrasi manusia, dan integrasi pasar global merupakan beberapa contoh yang mendorong proses globalisasi.

## 9.2. Sejarah dan Perkembangan Globalisasi

Sejarah globalisasi dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, tetapi globalisasi dalam konteks modern lebih terkait dengan perkembangan yang terjadi setelah Perang Dunia II. Beberapa tahapan penting dalam sejarah dan perkembangan globalisasi meliputi:

1. Zaman Penjelajahan dan Perdagangan: Pada abad ke-15 hingga ke-17, penjelajahan bangsa Eropa ke berbagai belahan dunia membuka jalur perdagangan baru antara benua-benua. Hal ini mengakibatkan pertukaran budaya, barang, dan ide-ide antar wilayah yang sebelumnya terisolasi.
2. Revolusi Industri: Pada abad ke-18 dan ke-19, Revolusi Industri mempercepat integrasi ekonomi di seluruh dunia dengan pengembangan teknologi dan perluasan perdagangan global. Produksi massal dan transportasi yang lebih baik memungkinkan barang-barang diproduksi secara efisien dan didistribusikan secara luas.
3. Era Pasca-Perang Dunia II: Setelah Perang Dunia II, pembentukan organisasi internasional seperti PBB, IMF, dan Bank Dunia, serta perjanjian-perjanjian perdagangan seperti GATT (yang

kemudian menjadi WTO), mendukung kerjasama ekonomi antarnegara dan memfasilitasi perdagangan global yang lebih bebas.

4. Revolusi Teknologi dan Informasi: Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, revolusi teknologi informasi, seperti internet, telekomunikasi yang canggih, dan transportasi yang lebih cepat, mengubah lanskap globalisasi. Hal ini mempercepat pertukaran informasi, komunikasi, serta perdagangan di seluruh dunia.
5. Globalisasi Finansial: Pasar finansial global menjadi semakin terintegrasi, memungkinkan modal, investasi, dan spekulasi untuk bergerak secara bebas di seluruh dunia. Hal ini membawa manfaat ekonomi bagi beberapa negara tetapi juga meningkatkan risiko sistemik secara global.

Perkembangan globalisasi telah menghasilkan manfaat seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat, akses yang lebih besar terhadap teknologi dan informasi, serta pertukaran budaya yang lebih luas. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan ekonomi yang semakin besar antara negara-negara, hilangnya identitas budaya lokal, serta kerentanan terhadap krisis global.



### **9.3. Faktor-Faktor yang Mendorong Globalisasi**

Globalisasi dipengaruhi oleh beragam faktor yang berperan dalam mempercepat integrasi ekonomi, sosial, dan budaya di seluruh dunia. Beberapa faktor kunci yang mendorong globalisasi antara lain:

1. **Teknologi:** Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, telepon seluler, dan transportasi yang lebih cepat, memungkinkan orang untuk terhubung dengan mudah di seluruh dunia. Ini memfasilitasi pertukaran informasi, perdagangan, dan komunikasi lintas batas.
2. **Perdagangan Bebas:** Kebijakan perdagangan bebas antarnegara, yang diwujudkan melalui perjanjian-perjanjian perdagangan seperti WTO, NAFTA, dan UE, telah memfasilitasi arus barang dan jasa di seluruh dunia dengan mengurangi hambatan perdagangan.
3. **Perkembangan Transportasi:** Kemajuan dalam teknologi transportasi, seperti penerbangan yang lebih murah, pengembangan jaringan logistik global, dan infrastruktur yang lebih baik, telah mempermudah pergerakan barang dan orang antarnegara.

4. Investasi Asing: *Foreign Direct Investment* (FDI) merupakan suatu media atau sebagai alat di dalam sistem ekonomi yang dimana dinamika ekonomi di dunia sudah mengglobal. FDI adalah jenis investasi secara langsung oleh luar negeri. Investasi langsung asing (FDI) telah menjadi faktor penting dalam menghubungkan ekonomi global. Perusahaan multinasional menginvestasikan modal dan membangun rantai pasokan di berbagai negara, memperkuat keterkaitan ekonomi global.
5. Pemangkasan Batasan Politik: Liberalisasi kebijakan ekonomi oleh banyak negara, termasuk pengurangan tarif, penghapusan hambatan perdagangan, dan deregulasi ekonomi, telah membantu mendorong pertumbuhan hubungan ekonomi antarnegara.
6. Migrasi dan Mobilitas Manusia: Pergerakan manusia yang lebih mudah antarnegara, baik untuk tujuan pekerjaan, pendidikan, atau pencarian kesempatan, juga telah berkontribusi pada globalisasi dengan membawa pengaruh budaya dan sosial yang beragam.
7. Media dan Budaya Populer: Ekspansi media massa, seperti film, musik, dan media sosial,

memungkinkan budaya populer menyebar dengan cepat di seluruh dunia, menciptakan kesamaan dalam preferensi dan tren budaya.

8. Integrasi Keuangan: Globalisasi keuangan memungkinkan arus modal yang lebih bebas di pasar keuangan internasional, tetapi juga dapat menyebabkan volatilitas ekonomi yang lebih besar dan krisis keuangan yang dapat menyebar dengan cepat di seluruh dunia.

Faktor-faktor ini secara bersama-sama telah memainkan peran krusial dalam mempercepat proses globalisasi di era modern, membentuk dunia yang semakin terhubung dan saling tergantung di berbagai bidang kehidupan.

#### **9.4. Nasionalisme dalam Konteks Globalisasi**

Nasionalisme dalam konteks globalisasi, seringkali menjadi subjek yang kompleks. Meskipun globalisasi mempercepat interkoneksi antarnegara dan melonggarnya batasan-batasan geografis, nasionalisme masih memiliki peran penting dalam dinamika politik, ekonomi, dan sosial di berbagai negara. Beberapa aspek penting nasionalisme dalam konteks globalisasi antara lain:

1. Identitas dan Kebanggaan Nasional: Meskipun ada pertukaran budaya yang luas dalam era globalisasi, banyak individu masih sangat terikat pada identitas nasional mereka. Rasa kebanggaan terhadap budaya, sejarah, bahasa, dan nilai-nilai nasional seringkali menjadi inti dari identitas individu. Identitas Nasional kita terdiri dari Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan (Bab XIV UUD Negara RI Tahun 1945).
2. Politik dan Kedaulatan: Meskipun ada kerjasama internasional yang erat, banyak negara masih sangat memperjuangkan kedaulatan mereka. Nasionalisme dapat menjadi pendorong utama dalam kebijakan politik yang bertujuan untuk mempertahankan otonomi dan kebijakan domestik suatu negara.
3. Ekonomi dan Perlindungan Kebangsaan: Meskipun globalisasi memungkinkan akses terhadap pasar global, sebagian negara juga melindungi industri domestik mereka melalui kebijakan proteksionisme untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan kemandirian ekonomi.

4. Resistensi terhadap Homogenisasi Budaya: Meskipun budaya global menyebar luas, nasionalisme bisa menjadi benteng melawan homogenisasi budaya. Beberapa negara berjuang untuk mempertahankan keunikan budaya mereka melawan pengaruh global yang dapat mengaburkan kekhasan lokal.
5. Pengaruh Politik dalam Isu Global: Pada tingkat internasional, negara-negara sering kali menggunakan nasionalisme sebagai alat politik untuk memperjuangkan kepentingan nasional mereka dalam forum-forum global, seperti diplomasi, keamanan, dan lingkungan.
6. Kesenjangan Identitas dan Tantangan Globalisasi: Globalisasi juga menciptakan ketidakpastian identitas di antara individu yang merasa terbagi antara identitas nasional dan identitas global yang semakin terbuka lebar melalui media dan pertukaran budaya.

Dalam esensi, nasionalisme masih menjadi kekuatan yang relevan dalam era globalisasi, walaupun dihadapkan pada tantangan baru yang diakibatkan oleh interkoneksi yang semakin erat di tingkat global. Peran nasionalisme dalam menyeimbangkan antara identitas

lokal dan integrasi global sering menjadi subjek perdebatan yang menarik dibanyak konteks politik dan sosial.

### **9.5. Dampak Globalisasi terhadap Nasionalisme**

Dampak globalisasi terhadap nasionalisme dapat bervariasi, tergantung pada konteksnya dan bagaimana interaksi antara globalisasi dan nasionalisme diartikan atau dimanifestasikan dalam berbagai masyarakat. Beberapa dampak utama termasuk:

1. Penguatan Identitas Nasional: Dibeberapa kasus, globalisasi telah memperkuat kesadaran akan identitas nasional. Ketika terjadi pertukaran budaya dan nilai-nilai global, masyarakat dapat merespons dengan semakin menghargai dan memperkuat identitas nasional mereka sebagai bentuk melawan homogenisasi budaya.
2. Perubahan Budaya Lokal: Meskipun globalisasi membawa pengaruh budaya dari luar, kadangkadang hal ini dapat merangsang masyarakat untuk mempertahankan dan merawat warisan budaya lokal mereka. Hal ini dapat menghasilkan revitalisasi budaya lokal sebagai tanggapan terhadap arus global.

3. Tantangan Terhadap Identitas Nasional: Di sisi lain, globalisasi juga dapat mempengaruhi identitas nasional. Terutama di kalangan generasi muda, eksposur terhadap budaya global dapat menyebabkan identitas nasional menjadi lebih kompleks, dengan banyak individu yang merasakan identitas ganda atau lebih terbuka terhadap pengaruh global.
4. Perubahan dalam Politik dan Ekonomi: Globalisasi ekonomi dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap ekonomi domestik, yang dapat menjadi sumber ketegangan dan meningkatkan semangat nasionalisme ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan proteksionisme atau upaya untuk menjaga kemandirian ekonomi.
5. Kesenjangan Sosial dan Politik: Globalisasi juga dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi di beberapa negara. Ketidaksetaraan yang meningkat ini dapat memicu reaksi nasionalisme, di mana kelompok tertentu berusaha melindungi kepentingan mereka dan menentang integrasi global.
6. Perubahan dalam Tata Kelola Global: Negara-negara yang memiliki kekuatan dan pengaruh

lebih besar dalam skala global mungkin menggunakan nasionalisme sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan mereka di panggung internasional. Ini dapat mengubah dinamika kekuasaan dan diplomasi global.

Dampak-dampak ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara globalisasi dan nasionalisme. Sementara globalisasi dapat membawa manfaat dalam bentuk pertukaran budaya dan ekonomi yang lebih luas, dampaknya terhadap identitas nasional dan politik domestik juga harus dipertimbangkan dengan cermat.

#### **9.6. Kebijakan dan Strategi dalam Mempertahankan Nasionalisme**

Mempertahankan nasionalisme dalam era globalisasi membutuhkan pendekatan yang seimbang antara memelihara identitas nasional dan merespons realitas global yang terus berubah. Beberapa kebijakan dan strategi yang bisa dipertimbangkan termasuk:

1. Pendidikan Budaya dan Sejarah Nasional: Meningkatkan pemahaman tentang budaya lokal dan sejarah nasional melalui pendidikan dapat memperkuat identitas nasional. Kebijakan untuk memasukkan kurikulum yang memperkuat nilai-



nilai budaya dan sejarah lokal dapat membantu masyarakat memahami identitas mereka secara lebih mendalam.

2. Promosi Budaya Lokal dan Kesenian: Dukungan terhadap seni, musik, tarian, dan budaya lokal melalui program-program pemerintah atau inisiatif swasta dapat memelihara keunikan budaya dan identitas nasional.
3. Kebijakan Ekonomi yang Berorientasi pada Kemandirian: Melalui kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat industri dalam negeri dan mempertahankan kemandirian ekonomi, negara bisa menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meredam dampak negatif dari globalisasi.
4. Regulasi yang Menghormati Identitas Nasional: Pengaturan terkait media, hiburan, dan perdagangan yang mempertahankan identitas nasional tanpa menghambat akses terhadap kebudayaan global dapat menjadi strategi penting dalam mempertahankan nasionalisme.
5. Kemitraan Internasional yang Seimbang: Menjalin kerjasama internasional yang mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional sambil tetap terbuka terhadap ide dan

inovasi global dapat menjadi strategi yang efektif.

6. **Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat:** Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan mendengarkan aspirasi mereka tentang nilai-nilai dan identitas nasional dapat memperkuat rasa memiliki terhadap negara dan budaya mereka.
7. **Keseimbangan Antara Global dan Lokal:** Mengembangkan strategi yang menyeimbangkan integrasi global dengan kebutuhan untuk mempertahankan keunikan dan kepentingan nasional dapat membantu menjaga kesinambungan identitas nasional.
8. **Penggunaan Media dan Komunikasi yang Dapat Memperkuat Identitas Nasional:** Memanfaatkan media dan komunikasi untuk mempromosikan nilai-nilai nasionalisme, membangun kesadaran akan sejarah dan kebudayaan nasional, serta menyoroti prestasi lokal dapat menjadi strategi yang efektif.

Kebijakan dan strategi ini dapat membantu dalam mempertahankan rasa nasionalisme sambil tetap terbuka terhadap manfaat globalisasi. Penting untuk

mengadopsi pendekatan yang seimbang, memahami kompleksitas dinamika antara identitas nasional dan integrasi global dalam menjaga keseimbangan yang tepat.

# **BAB X**

## **KEAMANAN NASIONAL DAN SOLIDARITAS INTERNASIONAL**

### **10.1. Definisi dan Ruang Lingkup Keamanan Nasional**

Definisi dan ruang lingkup keamanan nasional menyoroti konsep keseluruhan yang mencakup berbagai aspek penting dalam melindungi kepentingan dan keamanan suatu negara. Berikut adalah contoh penjelasan untuk definisi dan ruang lingkup keamanan nasional:

Definisi Keamanan Nasional: Keamanan nasional merujuk pada upaya suatu negara untuk melindungi kepentingan, kedaulatan, dan keberlangsungan eksistensinya dari berbagai ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ini mencakup strategi, kebijakan, dan tindakan yang diambil untuk mempertahankan kestabilan dan kedamaian dalam negeri.

Ruang Lingkup Keamanan Nasional:

1. Aspek Militer: Meliputi pertahanan fisik, kekuatan militer, dan strategi pertahanan untuk

melindungi dari serangan fisik dan agresi militer dari luar.

2. **Keamanan Politik:** Menyangkut stabilitas politik di dalam negeri, termasuk pencegahan konflik internal, penghindaran pemberontakan, atau ancaman terhadap stabilitas politik.
3. **Keamanan Ekonomi:** Melibatkan kebijakan dan strategi untuk melindungi sumber daya ekonomi, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi dari ancaman seperti sabotase, perang ekonomi, atau krisis keuangan.
4. **Keamanan Sosial:** Terkait dengan stabilitas sosial dan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman seperti kerusuhan, radikalisasi, atau gangguan sosial lainnya.
5. **Keamanan Cyber:** Semakin pentingnya dalam era digital, keamanan cyber mencakup perlindungan terhadap serangan dan ancaman di dunia maya yang dapat membahayakan infrastruktur, data, dan operasi penting suatu negara.
6. **Intelijen dan Keamanan Informasi:** Pentingnya pengumpulan informasi dan analisis intelijen untuk mencegah ancaman potensial terhadap keamanan nasional.

Ruang lingkup ini sering berubah seiring perkembangan teknologi, dinamika politik global, dan perubahan dalam ancaman yang dihadapi oleh suatu negara. Definisi dan ruang lingkup keamanan nasional bisa bervariasi antara negara-negara sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan tantangan unik yang mereka hadapi.

## **10.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keamanan Nasional**

Faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan nasional bisa sangat kompleks dan bervariasi, karena mereka dapat berasal dari berbagai dimensi, termasuk politik, ekonomi, militer, sosial, dan teknologi. Beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keamanan nasional antara lain:

1. Faktor Internal:
  - Stabilitas Politik: Ketahanan pemerintahan dan stabilitas politik di dalam negeri memainkan peran kunci dalam keamanan nasional. Konflik politik internal, perpecahan sosial, atau pemberontakan dapat mengganggu stabilitas negara.
  - Ekonomi yang Stabil: Keamanan ekonomi, termasuk ketahanan terhadap krisis

keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang kuat, memengaruhi kemampuan negara untuk menjaga kestabilan sosial dan keamanan.

- **Kesejahteraan Sosial:** Ketidaksetaraan sosial, ketidakpuasan massa, dan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketegangan antar-etnis dapat menjadi sumber konflik internal yang berpotensi membahayakan keamanan nasional.
- **Ketahanan Terhadap Ancaman Internasional:** Kemampuan untuk melindungi infrastruktur kritis, sistem komunikasi, dan informasi dari serangan siber dan ancaman lainnya juga menjadi faktor penting.

## 2. Faktor Eksternal:

- **Kondisi Geopolitik:** Dinamika regional dan global, seperti persaingan kekuatan besar, konflik regional, atau hubungan antarnegara, memengaruhi keamanan nasional suatu negara.
- **Ancaman Militer Asing:** Ancaman dari negara lain, termasuk konflik perbatasan, ancaman serangan militer, atau konflik

ideologis, dapat berdampak pada keamanan nasional.

- Globalisasi dan Interkoneksi: Sementara globalisasi membawa manfaat, ketergantungan ekonomi dan politik antarnegara juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap krisis di luar negeri yang berpotensi mempengaruhi keamanan nasional.
- Perubahan Iklim dan Sumber Daya: Ancaman terhadap lingkungan, perubahan iklim, serta persaingan atas sumber daya alam seperti air, energi, dan sumber daya strategis lainnya juga dapat mempengaruhi keamanan nasional.

Faktor-faktor ini saling terkait dan kompleks, dan mereka dapat berubah seiring waktu, teknologi, perubahan politik, dan dinamika global yang berkembang. Pengelolaan faktor-faktor ini menjadi bagian penting dari kebijakan keamanan nasional suatu negara.



### **10.3. Tantangan Terhadap Keamanan Nasional di Era Global**

Di era global, tantangan terhadap keamanan nasional menjadi lebih kompleks karena adanya interkoneksi yang kuat antara negara-negara di seluruh dunia. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam konteks keamanan nasional di era global antara lain:

1. Ancaman Teroris Internasional: Terorisme telah menjadi ancaman global yang melintasi batas negara. Grup teroris transnasional dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan ekonomi, serta menyebabkan ketidakstabilan di tingkat global.
2. Serangan Siber: Serangan siber yang kompleks dan canggih dapat menyasar infrastruktur kritis, sistem keuangan, dan informasi penting suatu negara, mengancam keamanan nasional dengan mengganggu operasi penting.
3. Proliferasi Senjata dan Konflik Regional: Proliferasi senjata nuklir, kimia, dan biologi menjadi ancaman serius, serta ketegangan regional yang meningkat dapat memicu konflik yang berdampak luas.
4. Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Perubahan iklim menyebabkan ancaman

terhadap sumber daya alam dan infrastruktur, meningkatkan kerentanan terhadap bencana alam yang berdampak besar pada keamanan nasional.

5. Ketidakstabilan Politik dan Konflik Internal: Ketidakstabilan politik, konflik etnis, dan perang saudara dalam suatu negara dapat menyebabkan kerentanan terhadap ekstremisme, migrasi paksa, atau pengungsi yang dapat mengancam stabilitas regional dan global.
6. Ketidakpastian Ekonomi dan Keharmonisan Pasar Global: Krisis keuangan dan ketidakpastian ekonomi dapat menyebabkan kerentanan ekonomi yang berdampak luas pada keamanan nasional, terutama jika terjadi resesi global.
7. Peran Teknologi dalam Pengawasan dan Perangkat Perang Modern: Kemajuan teknologi dalam pengawasan, pengintaian, dan senjata canggih memunculkan tantangan baru dalam perlindungan dan pertahanan terhadap ancaman.

Penanganan tantangan-tantangan ini memerlukan kerja sama internasional yang kuat, kebijakan yang

terarah, penggunaan teknologi yang cerdas, serta strategi pertahanan yang adaptif dan proaktif untuk melindungi kepentingan nasional dalam konteks global yang terus berubah.

#### **10.4. Solidaritas Internasional**

Solidaritas internasional merujuk pada kerja sama, dukungan, dan rasa tanggung jawab bersama antar negara-negara di dunia. Ini mencakup berbagai aspek dari dukungan kemanusiaan hingga kerjasama politik dan ekonomi. Beberapa poin penting mengenai solidaritas internasional:

1. Kerjasama Kemanusiaan: Bantuan dan Tanggapan Kemanusiaan: Negara-negara dapat berkolaborasi dalam menyediakan bantuan kemanusiaan, tanggapan terhadap bencana alam, dan membantu negara-negara yang membutuhkan dalam situasi krisis.
2. Diplomasi dan Keamanan Global:
  - Kerjasama Diplomatik: Negara-negara dapat bekerja sama dalam forum internasional untuk menyelesaikan konflik, menjaga perdamaian, dan menciptakan kerangka kerjasama politik global.

- Solidaritas dalam Keamanan: Solidaritas juga bisa diwujudkan dalam mendukung upaya-upaya untuk mengatasi ancaman global seperti terorisme, proliferasi senjata, atau konflik regional.
3. Pembangunan dan Ekonomi:
- Bantuan Pembangunan: Kerjasama dalam memberikan bantuan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan dapat meningkatkan solidaritas internasional.
  - Perdagangan dan Investasi: Negara-negara dapat saling mendukung melalui perdagangan dan investasi yang adil, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi global yang seimbang.
4. Isu-isu Global:
- Kerjasama Lingkungan: Solidaritas internasional dalam menjaga lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim adalah bagian penting dari agenda global.
  - Kesehatan Global: Tanggapan terhadap krisis kesehatan global, pengendalian penyakit menular, dan akses universal

terhadap layanan kesehatan adalah bagian dari solidaritas dalam kesehatan global.

5. Pendekatan Multilateral: Kerangka Kerjasama Multilateral: Forum-forum multilateral seperti PBB, WTO, atau organisasi regional dapat menjadi platform untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama internasional.

Solidaritas internasional menciptakan fondasi penting bagi perdamaian, stabilitas, dan kemajuan global. Ini juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang bersifat inklusif, mengakui kepentingan bersama dalam menangani masalah global yang kompleks.

### **10.5. Interkoneksi antara Keamanan Nasional dan Solidaritas Internasional**

Interkoneksi antara keamanan nasional dan solidaritas internasional mencerminkan keterkaitan yang penting antara melindungi kepentingan nasional suatu negara dengan kerja sama, dukungan, dan tanggung jawab bersama antar negara di tingkat global. Hubungan antara kedua konsep ini mencakup beberapa aspek krusial:

1. Solidaritas Internasional Memperkuat Keamanan Nasional:

- Kerjasama Dalam Mengatasi Ancaman Bersama: Solidaritas internasional memungkinkan negara-negara untuk berkolaborasi mengatasi ancaman bersama seperti terorisme, penyebaran senjata, atau serangan siber, yang dapat menguntungkan keamanan nasional masing-masing negara.
  - Kerjasama Dalam Menjaga Stabilitas: Solidaritas memungkinkan negara-negara untuk bekerja sama dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi, yang secara langsung berdampak pada keamanan nasional mereka.
  - Dukungan Internasional Dalam Krisis: Solidaritas internasional dapat membantu negara-negara yang mengalami krisis, baik kemanusiaan maupun politik, yang jika tidak ditangani dengan baik, dapat membahayakan stabilitas di tingkat regional atau bahkan global.
2. Keamanan Nasional Mempromosikan Solidaritas Internasional:
- Keterlibatan Konstruktif: Negara-negara yang memiliki stabilitas dan keamanan yang kuat cenderung menjadi mitra yang lebih

baik dalam kerjasama internasional, mendorong solidaritas antara mereka dan negara lain.

- **Kepentingan Bersama dalam Perdamaian:** Upaya menjaga keamanan nasional sering kali melibatkan upaya menjaga perdamaian global, yang pada gilirannya meningkatkan kesadaran akan kebutuhan akan solidaritas dan kerjasama antar negara.
- **Kontribusi Positif terhadap Isu-isu Global:** Negara-negara yang memprioritaskan keamanan nasional mereka sering kali juga aktif dalam memberikan kontribusi terhadap isu-isu global seperti lingkungan, kesehatan, atau bantuan pembangunan, yang memperkuat solidaritas internasional.

Interkoneksi antara keamanan nasional dan solidaritas internasional menunjukkan bahwa keamanan satu negara dapat dipengaruhi oleh solidaritas internasional, dan sebaliknya, upaya kerjasama internasional juga dapat memberikan manfaat bagi keamanan nasional. Hubungan ini memperlihatkan pentingnya kerja sama global dalam mewujudkan stabilitas dan kedamaian dunia.

## **10.6. Etika dan Tanggung Jawab Bersama dalam Keamanan Global**

Etika dan tanggung jawab bersama memainkan peran penting dalam konteks keamanan global. Memperhatikan nilai-nilai etika dalam kebijakan keamanan membentuk landasan moral untuk tindakan bersama, sementara tanggung jawab bersama menekankan pentingnya keterlibatan kolektif dalam menanggapi tantangan global. Beberapa poin penting terkait etika dan tanggung jawab bersama dalam keamanan global termasuk:

1. Etika dalam Keamanan Global:
  - Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan: Etika dalam keamanan global menekankan perlindungan hak asasi manusia, menghindari kekerasan yang tidak perlu, dan memberikan bantuan kemanusiaan dalam situasi konflik atau krisis.
  - Keadilan dan Kesetaraan: Penerapan keadilan dan kesetaraan dalam kebijakan keamanan global, termasuk dalam penanganan konflik atau dalam distribusi sumber daya yang dapat mempengaruhi stabilitas global.



- Kebijakan Lingkungan: Etika dalam keamanan global juga mencakup perlindungan lingkungan dan pertimbangan terhadap dampak lingkungan dari kebijakan keamanan yang diambil.
2. Tanggung Jawab Bersama dalam Keamanan Global:
- Kerjasama Internasional: Tanggung jawab bersama menuntut kerjasama aktif antar negara-negara untuk menanggapi ancaman global seperti terorisme, perubahan iklim, atau pandemi.
  - Kerangka Hukum Internasional: Mematuhi aturan dan konvensi internasional dalam menanggapi masalah keamanan global adalah bagian dari tanggung jawab bersama.
  - Keterlibatan Sipil dan Swasta: Tanggung jawab bersama melibatkan juga keterlibatan aktor-aktor sipil dan swasta dalam upaya mempromosikan keamanan global dan mengatasi tantangan yang ada.
3. Implementasi Prinsip-Prinsip Etika dan Tanggung Jawab Bersama:
- Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan dan kesadaran akan nilai-nilai etika serta

pentingnya tanggung jawab bersama dalam keamanan global dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemimpin atas isu-isu ini.

- Kolaborasi Institusional: Kolaborasi antar lembaga internasional, LSM, dan pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dan tanggung jawab bersama menjadi kunci dalam mencapai keamanan global yang berkelanjutan.

Penting untuk memperhatikan bahwa implementasi etika dan tanggung jawab bersama dalam keamanan global membutuhkan komitmen kuat dari berbagai pihak, serta kesediaan untuk mengedepankan nilai-nilai moral dan kesejahteraan bersama dalam menghadapi tantangan global.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. A. (2017). "The Challenge of Human Rights in Indonesia: Pancasila and Islamic Perspectives." *Journal of Indonesian Legal Studies*, 2(1), 50-68.
- Arifin, A. (2019). "Challenges of Nationalism and Unity in the Era of Information Technology." *Journal of Indonesian Studies*, 6(2), 210-225.
- Art, R. J., & Waltz, K. N. (2009). "The Use of Force: Military Power and International Politics." Rowman & Littlefield Publishers.
- Banks, J. A. (Ed.). (2008). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. Jossey-Bass.
- Barry, H. (2018). "Understanding Security Practices in the Global South: A Securitisation Perspective." *International Studies Review*, 20(1), 51-72.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (Eds.). (2017). "The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations." Oxford University Press.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (Eds.). (2017). *The globalization of world politics: An introduction to international relations* (7th ed.). Oxford University Press.

- Bellamy, A. J., & McDonald, M. (2013). "Rights, Security, and Conflict Prevention: The Role of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights." *Human Rights Quarterly*, 35(1), 72-108.
- Biesta, G. (2012). *Good Education in an Age of Measurement: Ethics, Politics, Democracy*. Routledge.
- Booth, K. (2007). *Theory of World Security*. Cambridge University Press.
- Breuilly, John. (2013). *The Oxford Handbook of the History of Nationalism*. Oxford University Press.
- Budi Juliardi, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Campbell, D. E. (2008). Voice in the Classroom: How an Open Classroom Climate Fosters Political Engagement among Adolescents. *Political Behavior*, 30(4), 437-454.
- Chandler, D. (2014). *Global Civil Society: Shifting Powers in a Shifting World*. Policy Press.
- Collins, A. (2007). *Contemporary Security Studies*. Oxford University Press.
- Danujaya, A. P. (2015). *Pancasila: Falsafah Hidup Bangsa*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

- Djayakusuma, D. H. (2018). "Pancasila and Political Islam: Competing Identity in Indonesia." *Journal of Government and Politics*, 9(1), 123-136.
- Donnelly, J. (2013). "Universal Human Rights in Theory and Practice." Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Dwijendra, U. (2021) 'Membangun Karakter Berlandaskan Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global', Dwijendra, U. (2021). Dalam Perspektif Kehidupan Global. 9(2), 423-430., 9(2), pp. 423-430.
- Fatmah, Reyza and Aisa Hannum Ritonga (2020) 'Pancasila Sebagai Dasar Negara', Pancasila Sebagai Dasar Negara, 1(Pancasila), pp. 1-12. Available at: <http://satujam.com/pancasila-dan-lambangnya/>.
- Forsythe, D. P. (2017). "Human Rights in International Relations." Cambridge: Cambridge University Press.
- Friedman, T. L. (2005). *The world is flat: A brief history of the twenty-first century*. Farrar, Straus and Giroux.
- Gargarella, R. (2016). *Latin American Constitutionalism, 1810-2010: The Engine Room of the Constitution*. Oxford University Press.

- Gellner, E. (2009). Nations and nationalism. Cornell University Press.
- Gellner, Ernest. (2008). "Nations and Nationalism." Cornell University Press.
- Goodhart, M. (2016). "Human Rights: Politics and Practice." Oxford: Oxford University Press.
- Guibernau, M. (2013). Nationalisms: The nation-state and nationalism in the twentieth century. Polity Press.
- Guibernau, Montserrat. (2013). "The Identity of Nations." Polity Press.
- Gurr, Ted Robert. (2000). "People versus States: Minorities at Risk in the New Century." United States Institute of Peace Press.
- Hadiwinata, B. S. (2015). "Pancasila di Era Milenium: Tantangan dan Harapan." Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadiz, V. R. (2016). "Islamic Populism in Indonesia and the Middle East." Cambridge: Cambridge University Press.
- Held, D. (2004). Globalization and the challenges to state sovereignty and security. In Global transformations: Politics, economics and culture (pp. 165-185). Stanford University Press.

- Hess, D. E. (2009). *Controversy in the Classroom: The Democratic Power of Discussion*. Routledge.
- Hess, D. E., & McAvoy, P. (2015). *The Political Classroom: Evidence and Ethics in Democratic Education*. Routledge.
- Hobsbawm, E. (2007). *Globalization, democracy, and terrorism*. Little, Brown Book Group.
- Horowitz, Donald L. (2000). "Ethnic Groups in Conflict." University of California Press.
- Ignatieff, M. (2017). "The Ordinary Virtues: Moral Order in a Divided World." Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). "Introduction to International Relations: Theories and Approaches." Oxford University Press.
- Jakni, 2014, *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*, Alfabeta, Bandung
- Johana, R. and Widiarti, N. (2020) *Kebhinnekaan di tengah di Tengah COVID-19*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Kaufmann, Chaim. (2006). "Ethnicity and Nationalism." Sage Publications.
- Kementrian PPN (2020) 'Rencana Strategis KPPN/Bappenas 2020-2024', Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala



- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, pp. 1–161.
- Kriesi, H. (2008). *West European politics in the age of globalization*. Cambridge University Press.
- Laporan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2016.
- Lestari, S. (2018). Peran teknologi dalam pendidikan di era globalisasi. *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 94-100.
- Levinson, M. (2012). *Democratic Education*. Princeton University Press.
- M.Syamsuddin, 2009, *Pendidikan Pancasila, Total media*, Yogyakarta.
- Malesevic, Sinisa. (2013). "Nation-States and Nationalisms: Organization, Ideology and Solidarity." Polity Press.
- Manby, B. (2016). "Citizenship Law in Africa: A Comparative Study." Oxford: Open Society Foundations.
- Mandagie, M.N.N. (2022) 'Konflik Berkelanjutan dan Pembangunan Berkelanjutan Melalui Laut China Selatan', *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 7(2), pp. 1–10. Available at: [https://kemlu.go.id/portal/id/page/101/jurnal\\_hubungan\\_luar\\_negeri](https://kemlu.go.id/portal/id/page/101/jurnal_hubungan_luar_negeri).

- Mangkunegara, W. (2019). *Perjalanan Sejarah Pancasila*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Motomura, H. (2018). "Americans in Waiting: The Lost Story of Immigration and Citizenship in the United States." New York, NY: Oxford University Press.
- Muchtar Ghazali, 2014, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Interes Media Foudation, Bandung
- Muhammad Erwin, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyadi, M. (2019). "Challenges in Implementing Pancasila Values in Indonesian Education." *Journal of Educational Development and Practice*, 12(2), 87-102.
- Nahak, H.M.. (2019) 'Upaya Melestarikan Budaya Indonesia Di Era Globalisasi', *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), pp. 65-76. Available at: <https://doi.org/10.33369/jsn.5.1.65-76>.
- Nata, A. (2019). "Pancasila: Ideology and the Indonesian Identity." Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Normina, N. (2017) 'Pendidikan dalam Kebudayaan', *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, 15(28), pp. 17-28.

- Nurmandi, A. (2018). "Democratic Challenges in Indonesia: The Implementation of Pancasila Democracy." *Asian Journal of Political Science*, 26(2), 173-189.
- Parsudi Suparlan. 2002. "Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural," Makalah. Disampaikan pada Simposium Internasional Bali ke-3, *Jurnal Antropologi Indonesia*, Denpasar Bali, 16-21 Juli 2002. Hlm. 1
- Prasetyo, T. (2017) 'Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi : Perspektif Teori Keadilan Bermartabat', *Journal Ilmu Kepolisian*, (088), pp. 80-87.
- Pratama, R. D. (2020). "Challenges in Achieving Social Justice: Perspectives from Pancasila in the Digital Age." *International Journal of Social Welfare*, 8(3), 321-335.
- Priyono, A. (2021). "The Role of Social Media in Challenging National Unity: Lessons from Indonesia." *International Journal of Communication*, 15, 3021-3041.
- Putra, R. T. (2020). "Challenges of Implementing Pancasila Values in the Public Sector: A Case Study of Indonesia." *Journal of Public Administration and Governance*, 10(2), 15-28.

- Rachmawati, I. D. (2013). "The Philosophical Foundation of Pancasila Education in Indonesia." *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 93, 1755-1759.
- Rahardi, R. K. (2014). "Pancasila sebagai Dasar Pembangunan Masyarakat." Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rais, M. (2018). *Pancasila dan Modernisasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Ritzer, G. (2011). *Globalization: A basic text*. John Wiley & Sons.
- Rizal, G. (2018). "Implementasi Pancasila dalam Pembangunan Bangsa." Jakarta: Kencana.
- Safril, M. A. (2011). Revitalisasi identitas kultural Indonesia di tengah upaya homogenisasi global. *Jurnal Global & Strategis*, 1(1), 75-85.
- Sen, A. (2009). *The Idea of Justice*. Harvard University Press.
- Sihati, A. et al. (2022) 'Kebhinekaan dan keberagaman', *Jurnal Inovasi penelitian*, 2(9), p. 2953. Available at: <https://stp-mataram.e-journal.id/JIP/article/view/1169>.
- Sparke, M. (2013). *Introducing globalization: Ties, tensions, and uneven integration* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

- Spiro, P. J. (2019). "At Home in Two Countries: The Past and Future of Dual Citizenship." New York, NY: NYU Press.
- Stearns, P. N. (2015). The globalization of world history (4th ed.). Routledge.
- Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and its discontents. W. W. Norton & Company.
- Sudargini, Y., & Purwanto, A. (2020). Pendidikan pendekatan multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0: a literature review. *Journal of Industrial Engineering & Management Research*, 1(3), 299-305.
- Sudirman, S. (2018). "Challenges of Implementing Pancasila in the Era of Globalization." *International Journal of Globalization Studies*, 13(2), 201-215.
- Suneki, S. (2012). Dampak globalisasi terhadap eksistensi budaya daerah. *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1).
- Sunendar. 2018. Dalam pemaparan makalah tentang Kebijakan Perlindungan Bahasa dalam Gelar Wicara dan Festival Tunas Bahasa Ibu di Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (21/2).

Dimuat dalam harian online Republika hari Rabu  
21 Februari 2018 12:16 WIB.

Surajiyo, 2009, Pendidikan Pancasila di Perguruan  
Tinggi, inti Prima, Jakarta

Suyahmo, S. (2022) 'Peran Negara terhadap Konflik  
SARA di Indonesia : Kajian Historis', *Antroposen:  
Journal of Social Studies and Humaniora*, 1(1),  
pp. 9–19. Available at:  
<https://doi.org/10.33830/antroposen.v>.

Waldron, J. (2016). "The Right to Private Property."  
Oxford: Oxford University Press.

Wandy Pratama, 2020, Pendidikan Kewarganegaraan,  
Mitra Wacana Media, Jakarta.

Wedasuwari, I.A.M. (2020) 'Membangun Toleransi  
Melalui Pendidikan Multikultural', *Jurnal  
Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1),  
pp. 35–46. Available at:  
[https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP  
/article/view/23548/14372](https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/23548/14372).

Wibowo, A. (2019). "Challenges in Implementing  
Pancasila as the Basis of State Policy." *Indonesian  
Journal of Political Science*, 7(2), 112-130.

Wicaksono, A. (2018). "Relevance of Pancasila Values in  
Facing Globalization Challenges." *Indonesian  
Journal of Social Sciences*, 3(2), 123-136.

Widiususeno, I. and Sudarsih, S. (2019) 'Penguatan Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Pencegahan Paham Radikalisme Dan Intoleransi Di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Salatiga Kotamadia Salatiga', *Harmoni*, 3(1), pp. 24–28

# PENDIDIKAN PANCASILA

Tulisan ini mengajak pembaca untuk menjelajahi dimensi-dimensi Pendidikan Pancasila, sebuah disiplin ilmu yang menggali hikmah dan nilai-nilai yang terkandung dalam dasar negara Indonesia, Pancasila. Pendidikan Pancasila bukan sekadar materi pelajaran di ruang kelas, melainkan upaya untuk meresapi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Kita akan menyelami sejarah perkembangan Pendidikan Pancasila, memahami konsep-konsep dasar yang menjadi landasan, dan mengeksplorasi implementasi Pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan Indonesia. Lebih dari itu, tulisan ini mengajak kita untuk merenung tentang relevansi Pendidikan Pancasila di tengah dinamika zaman dan kompleksitas tantangan global.



IKAPI  
IKATAN PENERBIT INDONESIA



Penerbit Yayasan  
Cendikia Mulia Mandiri



ISBN 978-623-8382-76-7



9 786238 382767